



HCV RESOURCE
NETWORK

ASSESSOR LICENSING SCHEME

ID Dokumen	ALS_02_N	BAHASA
Tanggal	08/11/2017	INDONESIA

HCSA

HIGH CARBON STOCK APPROACH

PEDOMAN PENILAIAN NKT-SKT

Untuk dipakai pada saat
penilaian NKT-SKT terpadu



Pedoman Penilaian NKT-SKT ini disusun oleh Proforest dan Daemeter untuk Skema Lisensi Penilai Jaringan Sumber Daya NKT dan Pendekatan Stok Karbon Tinggi. Untuk pertanyaan dan umpan balik terkait penggunaan Pedoman ini dan dokumen pendukungnya, silakan hubungi:

HCV Resource Network Secretariat (HCV Network Ltd)

West Suite, Frewin Chambers, Frewin Court, Oxford, OX1 3HZ United Kingdom

E: secretariat@hcvnetwork.org

Untuk pembaruan Pedoman dan informasi terkait Skema Lisensi Penilai Jaringan Sumber Daya NKT, silakan kunjungi:

www.hcvnetwork.org/als

Daftar Isi

Bab 1: Latar Belakang	6
1.1 PENDAHULUAN	6
1.2 APA TUJUAN PEDOMAN INI?	7
1.3 SIAPA YANG DAPAT MEMIMPIN PENILAIAN NKT-SKT?	8
1.4 CARA MENGGUNAKAN PEDOMAN INI	8
1.5 PENILAIAN NKT-SKT TERPADU	9
1.5.1 Organisasi: Menetapkan dasar sebelum melaksanakan penilaian	9
1.5.2 Penilaian NKT-SKT	10
1.5.3 Pascapenilaian: ICLUP dan produksi komoditas berkelanjutan	10
1.6 PETUNJUK PADIATAPA UNTUK TIM PENILAIAN	10
Bagian 2: Penilaian NKT-SKT	12
2.1 PENDAHULUAN	12
2.2 PRAPENILAIAN	14
2.2.1 Pengumpulan informasi dasar	14
2.2.2 Melaksanakan uji tuntas cepat	14
2.2.3 Melanjutkan dengan penilaian NKT-SKT	16
2.3 STUDI PEMERIKSAAN AWAL	16
2.3.1 Menetapkan cakupan penilaian	17
2.3.2 Pengumpulan informasi	17
2.3.3 Peta tutupan lahan awal dan analisis petak	18
2.3.4 Kunjungan lapangan	19
2.3.4.1 Identifikasi dan konsultasi pemangku kepentingan	19
2.3.4.2 Mengunjungi sampel masyarakat	20
2.3.4.3 Pencocokan awal peta tutupan lahan dengan kenyataan di lapangan	22
2.3.4.4 Identifikasi fitur biofisika dan ekologis	22
2.3.5 Hasil studi pemeriksaan awal	23
2.4 PERSIAPAN UNTUK PENILAIAN LENGKAP	25
2.4.1 Mendaftar dengan ALS	25
2.4.2 Tim penilaian	25
2.4.3 Mempersiapkan metode	25

2.5 PENILAIAN LENGKAP	27
2.5.1 Kerja lapangan sosial	27
2.5.1.1 Pemetaan partisipatif	28
2.5.1.2 Kajian sosial	29
2.5.2 Kerja lingkungan di lapangan	29
2.5.2.1 Inventori hutan SKT	30
2.5.2.2 Usaha identifikasi NKT	30
2.5.2.3 Kajian biofisika	31
2.5.2.4 Memverifikasi kajian gambut	31
 2.6 ANALISIS DAN INTERPRETASI	 32
2.6.1 Identifikasi NKT	32
2.6.2 Analisis petak hutan SKT	33
2.6.3 Identifikasi tanah masyarakat masyarakat lokal	33
2.6.4 Menginterpretasi kajian gambut	33
2.6.5 Menyelaraskan set data yang relevan untuk mengembangkan rancangan peta konservasi	34
2.6.6 Draf rekomendasi manajemen dan pengawasan	35
 2.7 KONSULTASI	 38
2.7.1 Masyarakat yang Terkena Dampak	39
2.7.2 Organisasi	39
2.7.3 Pemangku kepentingan lain	39
 2.8 PROSES KENDALI MUTU	 41
 LAMPIRAN	 42
LAMPIRAN 1: KERANGKA ACUAN KERJA TIM PENILAI NKT-SKT	42
LAMPIRAN 2: DAFTAR PERIKSA PERENCANAAN PENILAIAN	44
LAMPIRAN 3: DAFTAR PERIKSA KEBUTUHAN INFORMASI	45
LAMPIRAN 4: MENDOKUMENTASIKAN KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN	49

DAFTAR AKRONIM

AGB	Above ground biomass (biomassa permukaan tanah)
ALS	Assessor Licensing Scheme (Skema Lisensi Penilai)
AOI	Area of Interest (Wilayah Kepentingan)
CITES	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam)
HCSA	High Carbon Stock Approach (Pendekatan SKT)
HCVRN	High Conservation Value Resource Network (Jaringan sumber daya NKT)
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
HPP	High Priority Patch (Petak Prioritas Tinggi)
ICLUP	Integrated Conservation and Land Use Plan (Rencana Konservasi dan Penggunaan Lahan Terpadu)
IUCN	International Union for Conservation of Nature
LIDAR	Light Detection and Ranging (Deteksi Cahaya dan Pengukuran Jarak/metode pengindraan jarak jauh)
LPP	Low Priority Patch (Petak Prioritas Rendah)
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MPP	Medium Priority Patch (Petak Prioritas Medium)
MOU	Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)
NKT	Nilai Konservasi Tinggi
PADIATAPA	Persetujuan atas Informasi Awal dan Tanpa Paksaan
SDA	Sumber Daya Alam
SEIA	Social and Environmental Impact Assessment (Kajian Dampak Sosial dan Lingkungan)
SIA	Social Impact Assessment (Kajian Dampak Sosial)
SKT	Stok Karbon Tinggi

Bab 1: Latar Belakang

1.1 PENDAHULUAN

Penilaian NKT dan SKT di lapangan telah dilaksanakan secara terpisah oleh tim yang berbeda dan seringkali pada waktu yang berbeda. Jaringan Sumber Daya NKT dan Kelompok Pengarah Pendekatan SKT mengakui bahwa integrasi penilaian NKT dan SKT serta proses kendali mutu akan memungkinkan tercapainya efisiensi yang lebih tinggi dalam penempatan tim, penurunan biaya, dan mencegah terjadinya kebingungan di antara para pemangku kepentingan karena konsultasi yang dilakukan oleh berbagai tim. Untuk mencapai hal-hal tersebut, pada 2015 Kelompok Pengarah SKT menetapkan Kelompok Kerja NKT – SKT – PADIATAPA Terpadu. Kerja Kelompok Kerja Integrasi menghasilkan Modul 3 Set Alat SKT: Integrasi NKT, SKT, dan PADIATAPA pada Mei 2017. Modul 3 adalah ringkasan dan petunjuk untuk melaksanakan proses berbasis nilai NKT, PADIATAPA, dan SKT secara simultan di lapangan.

Telah diputuskan bahwa ke depannya **penilaian NKT-SKT-PADIATAPA terpadu wajib dilaksanakan (berarti kajian SKT wajib dilaksanakan sebagai bagian dari penilaian terpadu) dan laporan penilaian kendali mutu akan dilaksanakan oleh Skema Lisensi Penilai (ALS) JARINGAN SUMBER DAYA NKT**. Proses ini mengharuskan penyusunan Pedoman teknis yang lebih mendetail terkait dengan penilaian terpadu.

Periode awal untuk sistem baru:

Pembuatan Pedoman ini dan peluncuran penilaian NKT-SKT terpadu tidak berarti bahwa sekarang penilaian NKT dan SKT akan terpadu secara sempurna dan efisien. Akan tetapi, pakar NKT dan SKT sekarang akan bekerja di dalam tim yang sama, berbagi data, dan bersama-sama menerjemahkan hasilnya. Seiring dengan waktu, asumsinya adalah pakar NKT dan SKT akan lebih mempelajari hasil kerja masing-masing. Integrasi tentunya akan dapat ditingkatkan dengan adanya lebih banyak pengalaman dan dibuatnya lebih banyak petunjuk.

Penting untuk dipahami bahwa NKT dan SKT merupakan pendekatan dan set alat penilaian praktis. Namun, PADIATAPA bukanlah penilaian atau pun set alat, tetapi proses dan cara melaksanakan kerja yang mengharuskan adanya perubahan perilaku menuju pemberdayaan masyarakat untuk memusatkan masyarakat di dalam perencanaan penggunaan lahan serta pengaturan prioritas konservasi yang memengaruhi lahan masyarakat. Modul 3 berfokus pada aspek teknis pendekatan NKT dan SKT dan aspek utama PADIATAPA yang tidak dapat dipisahkan dari penilaian NKT-SKT. Pedoman ini tidak dinamai Pedoman Penilaian NKT-SKT-PADIATAPA, tetapi bukan berarti PADIATAPA dapat dipinggirkan pada pelaksanaan penilaian terpadu. Pedoman ini menyoroti di mana dan bagaimana PADIATAPA harus dicantumkan di dalam penilaian terpadu. Set alat SKT memiliki modul persyaratan sosial (Modul 2) yang membahas PADIATAPA secara lebih mendetail. Petunjuk implementasi juga disusun untuk memberikan arahan praktis lebih jauh untuk memenuhi persyaratan sosial SKT.

Jaringan Sumber Daya NKT memimpin penyusunan Pedoman ini yang dimulai pada 2016. Pada saat publikasi Modul 3 Set Alat SKT pada Mei 2017, Modul 3 dan Pedoman ini harus dipastikan selaras. Dari Mei hingga Juli 2017, Jaringan Sumber Daya NKT memimpin penyuntingan Pedoman dan melaksanakan konsultasi publik selama 30 hari, menghasilkan nyaris 300 komentar dari para pemangku kepentingan yang berkepentingan. Oleh karena itu, Pedoman ini merupakan produk dari masukan pemangku kepentingan, termasuk praktisi SKT dan NKT, perusahaan, LSM, serta pakar sosial dan lingkungan. Salah satu tugas editor adalah menyeleksi komentar yang meminta arahan preskriptif yang lebih mendetail dan saran untuk meningkatkan fleksibilitas, sehingga Pedoman ini dapat memenuhi permintaan semua pihak. Penilaian NKT-SKT masih relatif baru dan proses penilaian ini akan menghasilkan pelajaran yang dapat diambil. Oleh karena itu, Pedoman ini kemungkinan besar akan harus diperbarui secara Pedoman berdasarkan pengujian lapangan praktis.

1.2 APA TUJUAN PEDOMAN INI?

Pedoman ini merupakan dokumen acuan resmi untuk penilaian NKT-SKT. Pedoman ini terutama ditargetkan untuk memandu tim penilaian dalam proses penilaian NKT-CHSA. Namun, Pedoman ini juga berguna bagi para Organisasi¹ yang menunjuk penilai yang melaksanakan penilaian NKT-SKT dan pemangku kepentingan lain yang tertarik akan aspek teknis proses penilaian dan rincian kendali mutu Jaringan Sumber Daya NKT ALS.

Penting untuk memahami, terkait dengan publikasi Pedoman ini, bahwa:

- Pedoman ini merupakan dokumen acuan teknis untuk penilaian terpadu. Modul 3 Set Alat SKT tidak harus dipakai di dalam penilaian ini, tetapi berguna untuk audiens yang lebih umum.
- Semua penilaian SKT harus dilaksanakan sebagai penilaian NKT-SKT².
- Sistem tinjauan kualitas SKT untuk laporan penilaian SKT berdasarkan kajian sejawat atas penilaian ini tidak lagi berlaku sesudah Pedoman ini diterbitkan. Sebaliknya, kendali mutu penilaian NKT-SKT telah ditransfer kepada Jaringan Sumber Daya NKT ALS³.
- Penilaian NKT-SKT harus dipimpin oleh penilai yang memegang lisensi ALS.
- Pedoman ini dirancang untuk membantu Organisasi besar yang telah berkomitmen untuk melindungi hutan SKT, NKT, dan gambut, serta menghormati PADIATAPA masyarakat lokal dalam implementasi komitmen ini di lapangan.
- Pedoman ini dapat digunakan untuk penilaian terpadu dalam konteks komoditas apa pun. Namun, Pedoman ini terutama ditargetkan di konteks yang mencakup satu pemilik lahan berukuran besar atau Organisasi dengan hak pengembangan lahan dan produksi komoditas pertanian atau produk hutan di hutan tropis terfragmentasi (<80% tutupan hutan). Pedoman ini tidak diterapkan dalam konteks petani kecil atau pun konteks lanskap tutupan hutan yang tinggi—keduanya adalah subjek kelompok kerja SKT.
- Penilaian untuk hanya NKT akan dilanjutkan di bawah Jaringan Sumber Daya NKT ALS dengan menggunakan dokumen petunjuk ALS, template (dokumen standar) pelaporan, dan dokumen kendali mutu untuk hanya NKT.

1 Istilah “Organisasi” yang digunakan di dalam manual ini merujuk pada entitas yang bertanggung jawab untuk produksi komoditas dan menunjuk penilai yang melaksanakan penilaian

2 Pengecualiannya adalah penilaian SKT yang dilaksanakan di konteks lain, sekarang tidak tercakup di dalam set alat SKT (contohnya, lanskap tutupan hutan tinggi dan lanskap petani kecil). Hubungi HCSA untuk informasi selanjutnya.

3 Lihat bagian 2.8 untuk penjelasan sistem kendali mutu ALS.

1.3 SIAPA YANG DAPAT MEMIMPIN PENILAIAN NKT-SKT?

Penilaian NKT-SKT harus dipimpin oleh penilai yang memegang lisensi ALS⁴. Setidaknya dua anggota tim penilaian (termasuk pimpinan penilai) harus dari praktisi pendekatan SKT yang terdaftar. Setidaknya satu anggota tim penilaian harus dari pakar Sistem Informasi Geografis (SIG) dan pengindraan jarak jauh. Tambahan lain, harus ada setidaknya satu anggota dengan keahlian sosial, yang meliputi fasilitasi masyarakat dan pemetaan partisipatif⁵. Anggota tim harus dapat berkomunikasi dengan baik (yaitu, menghormati budaya lokal, menggunakan metode yang sesuai, menggunakan penerjemah) dan secara efektif dengan beragam pemangku kepentingan. Lihat Lampiran 1 terkait kerangka acuan kerja (ToR) untuk tim penilaian NKT-SKT.

1.4 CARA MENGGUNAKAN PEDOMAN INI

Untuk menghindari duplikasi, Pedoman ini dirancang untuk dikombinasikan dengan dokumen acuan lain (Kotak 1).

KOTAK 1: DOKUMEN ACUAN

PANDUAN UMUM IDENTIFIKASI NKT

Dokumen ini menjelaskan enam kategori NKT dan memberikan contoh sumber data yang bermanfaat, metode, dan NKT yang memungkinkan. Versi definisi NKT terbaru dapat ditemukan di situs Jaringan Sumber Daya NKT.

PANDUAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN NKT

Dokumen ini memberikan petunjuk mengenai metode lapangan pengawasan NKT (juga berguna untuk identifikasi NKT), identifikasi ancaman, dan rekomendasi pengelolaan secara umum. Selain itu, dokumen ini memberikan petunjuk mengenai prinsip pengelolaan dan pengawasan, dan cara untuk merencanakan dan menerapkan kegiatan tersebut.

SET ALAT PENDEKATAN SKT

Set alat ini terdiri dari tujuh modul, termasuk persyaratan sosial, integrasi NKT, SKT, dan PADIATAPA, dan modul teknis stratifikasi hutan dan analisis petak.

PETUNJUK IMPLEMENTASI PERSYARATAN SOSIAL

Dokumen ini sedang disiapkan dan akan memberikan petunjuk praktis mengenai pemenuhan persyaratan sosial SKT.

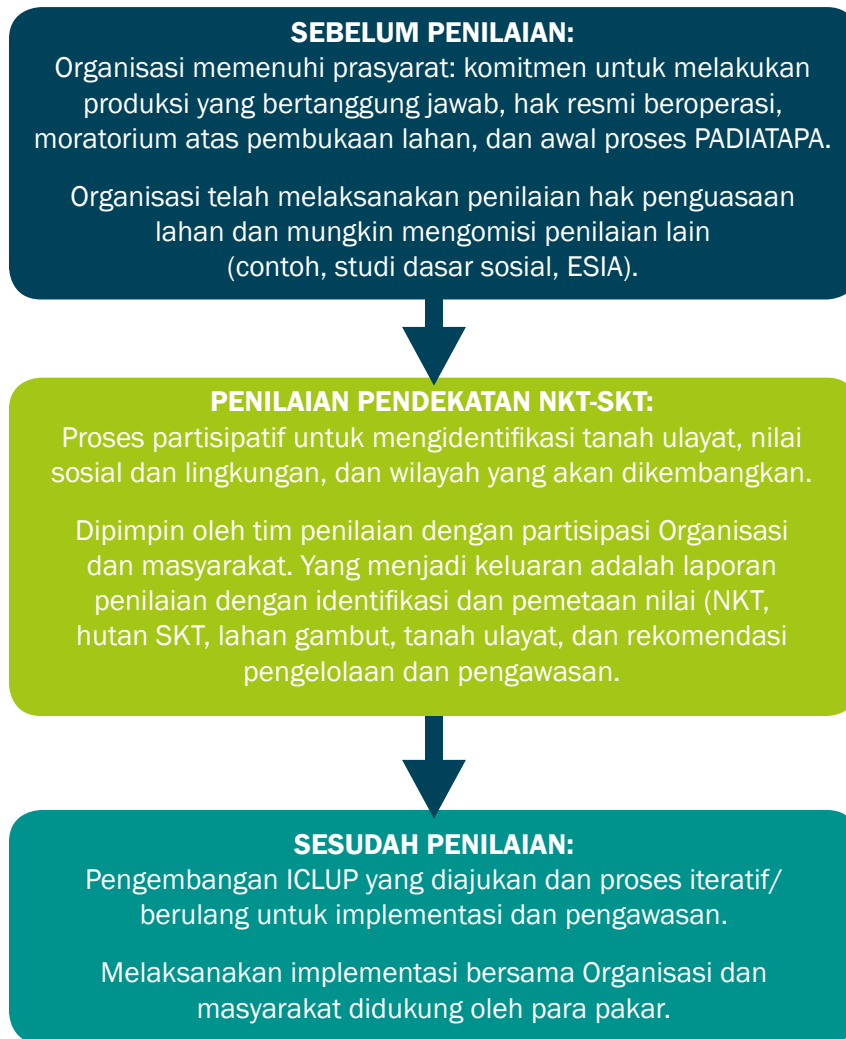
Tim penilaian diharapkan untuk membaca dokumen-dokumen tersebut secara mendetail sebelum memulai penilaian. Kunjungi situs ALS dan SKT sebelum memulai penilaian untuk versi terbaru semua dokumen tersebut.

⁴ Provisional atau lisensi penuh.

⁵ Pakar fasilitasi masyarakat di konteks negara berkembang berperan sangat penting di aspek sosial proses penilaian. Ini lebih daripada sekadar kemampuan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan belum tentu tercakup di dalam pelatihan ilmu sosial secara umum.

1.5 PENILAIAN NKT-SKT TERPADU

Gambar 1 menunjukkan bagaimana penilaian terpadu tercakup ke dalam Pendekatan SKT yang lebih luas.



Gambar 1 Proses keseluruhan dari produksi komoditas bertanggung jawab, menunjukkan bagaimana penilaian NKT-SKT (kotak hijau) termasuk di gambaran luas.

1.5.1 Organisasi: Menetapkan dasar sebelum melaksanakan penilaian

Sebelum penilaian dimulai, Organisasi harus memiliki izin atau hak resmi untuk mengeksplorasi dan/atau mengembangkan wilayah. Organisasi yang menunjuk penilai yang melaksanakan penilaian harus sudah terlibat dengan masyarakat untuk membahas:

- proyek yang diajukan (contoh, pengembangan pertanian, perkebunan pulp dan kertas) termasuk risiko dan manfaat potensialnya
- komitmen Organisasi untuk mengidentifikasi dan mempertahankan hutan NKT dan SKT di dalam wilayah operasi mereka dan lanskap sekelilingnya, bekerja sama dengan masyarakat dan para pelaku lain
- kenapa hutan SKT penting untuk masyarakat dan masyarakat yang lebih luas
- hak masyarakat untuk memilih antara mengidentifikasi dan mempertahankan NKT dan hutan SKT di tanah mereka, dan bagaimana masyarakat dapat berpotensi untuk didukung melalui insentif dan manfaat untuk mempertahankan semua hutan SKT teridentifikasi
- fase pengembangan proyek termasuk penilaian NKT-SKT

Mengingat masyarakat lokal akan dilibatkan, persetujuan awal mereka (PADIATAPA) harus didapatkan sebelum proses penilaian dimulai dan masyarakat harus menyetujui proses negosiasi keterlibatan dan persetujuan selanjutnya⁶. Organisasi diharuskan untuk melaksanakan penilaian hak penguasaan lahan (land tenure) dan mungkin telah melaksanakan sejenis pemetaan partisipatif yang akan memberikan informasi penting untuk memajukan penilaian NKT-SKT.

1.5.2 Penilaian NKT-SKT

Penilaian NKT-SKT adalah proses partisipatif untuk mengidentifikasi nilai sosial dan lingkungan yang harus dilestarikan di dalam lanskap produksi. Modul 3 Set Alat SKT meliputi kerangka kerja terpadu yang menjelaskan cara memadukan NKT, SKT, dan PADIATAPA sebagai bagian dari penilaian teknis. Pedoman teknis ini secara umum didasarkan pada kerangka kerja terpadu dan mencakup semua konten yang relevan dari Modul 3. Gambar 2 menunjukkan langkah-langkah di dalam penilaian NKT-SKT.

Peran dan tanggung jawab tim penilaian adalah mengidentifikasi nilai sosial dan lingkungan tersebut, bekerja sama dengan masyarakat lokal, pakar yang relevan, Organisasi, dan pemangku kepentingan lain yang berkepentingan untuk kemudian menyusun laporan penilaian. Laporan penilaian merupakan kompilasi temuan sosial dan lingkungan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dari studi lapangan, wawancara, pemetaan partisipatif, analisis citraan satelit, dll. dan diterjemahkan melalui lensa pendekatan NKT dan SKT. Kendali mutu laporan ini diawasi oleh Jaringan Sumber Daya NKT ALS yang memeriksa kecermatan teknis dan pemahaman teoretis serta praktis yang menyeluruh atas pendekatan NKT dan SKT.

1.5.3 Pascapenilaian: ICLUP dan produksi komoditas berkelanjutan

Penyelesaian penyusunan Rencana Konservasi dan Penggunaan Lahan Terpadu (Integrated Conservation and Land Use Plan/ICLUP) yang diajukan tidak termasuk ke dalam cakupan Pedoman ini dan bukan peran yang dimainkan oleh tim penilaian. Laporan penilaian ditujukan untuk menjadi dasar bagi Organisasi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain yang berkepentingan untuk meneruskan penyusunan ICLUP yang akan menentukan penggunaan lahan untuk produksi komoditas yang bertanggung jawab di dalam lanskap. SKT mengembangkan informasi tambahan untuk Organisasi dan pemangku kepentingan lain yang berkepentingan terkait proses Tinjauan Kualitas ICLUP yang diajukan.

1.6 PETUNJUK PADIATAPA UNTUK TIM PENILAIAN

Penerapan prinsip PADIATAPA pada dasarnya merupakan tanggung jawab Organisasi dan harus dilaksanakan sebelum penilaian NKT-SKT dimulai dan dilanjutkan sesudah penilaian berjalan. Akan tetapi, tim penilaian NKT-SKT harus betul-betul memahami prinsip PADIATAPA dan cara menggunakannya pada saat penilaian. Pedoman ini tidak menjelaskan prinsip PADIATAPA atau pun prosesnya secara mendetail. Silakan lihat

6 Persyaratan Sosial 2 Pendekatan SKT

Terkait dengan masyarakat lokal, yang harus dicatat adalah bahwa konsultasi bukan hanya meneruskan informasi dari penilai kepada anggota masyarakat atau dari Organisasi kepada anggota masyarakat. Sebaliknya, ketika konsultasi masyarakat dirujuk di dalam Pedoman ini, tujuannya adalah komunikasi dua arah yang melibatkan partisipasi aktif dan proses pembuatan keputusan bersama. Konsultasi harus adil, representatif, dan nondiskriminatif. Subkelompok harus diajak berkonsultasi. Hasil penilaian harus dipresentasikan kepada masyarakat yang terkena dampak untuk mendapatkan umpan balik; sesudah divalidasi oleh masyarakat yang terkena dampak, hasil tersebut kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk semua negosiasi.

Pedoman ini akan berfokus pada bagaimana PADIATAPA harus dipertimbangkan atau terpadu di dalam beragam kegiatan dan langkah penilaian. Kelompok Kerja Integrasi mengidentifikasi serangkaian “gerbang” PADIATAPA yang merupakan titik-titik dalam proses penilaian ketika masyarakat lokal dapat memutuskan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan. Titik-titik ini dirangkum di Gambar 2 dan dibahas di langkah penilaian di Bagian 2 Pedoman ini. Secara luas, tanggung jawab PADIATAPA penilai dibandingkan dengan tanggung jawab Organisasi yang menunjuk penilai yang melaksanakan penilaian dapat dijelaskan sebagai berikut⁷.

Tabel 1: Tanggung jawab PADIATAPA Organisasi dan penilai

PADIATAPA: TANGGUNG JAWAB ORGANISASI	PADIATAPA: TANGGUNG JAWAB PENILAI
- Melaksanakan pertemuan awal dan konsultasi pemangku kepentingan berdasarkan prinsip PADIATAPA. - Mendapatkan persetujuan masyarakat untuk melaksanakan studi pemeriksaan awal untuk Penilaian NKT-SKT yang kemudian diikuti oleh penilaian lengkap. - Membuat keputusan dengan setiap kelompok masyarakat mengenai prosedur mana yang akan dipakai untuk mendapatkan persetujuan masyarakat terkait pengembangan dan rencana konservasi. - Mencapai kesepakatan atas kawasan pengelolaan NKT-SKT final dan pengelolaannya, serta kegiatan pengawasannya. - Membahas insentif dan manfaat potensial dari konservasi dan pengembangan terpadu. - Membuat kesepakatan bagaimana masyarakat lokal akan diwakilkan di dalam proyek dan bagaimana masyarakat akan memberikan persetujuan. - Pelatihan staf.	- Melanjutkan dengan kegiatan pelatihan (contohnya, pemetaan partisipatif, inventarisasi hutan) hanya jika persetujuan didapatkan. - Menggunakan prinsip PADIATAPA pada saat pemetaan partisipatif dan konsultasi pemangku kepentingan. - Memberikan informasi untuk konsultasi dan diskusi dengan masyarakat dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. - Hadir pada saat konsultasi, kawasan pengelolaan NKT-SKT awal, dan rekomendasi pengelolaan dan pengawasan yang diajukan. - Berkonsultasi dengan perwakilan masyarakat dan LSM sosial untuk mengumpulkan pendapat mengenai kualitas proses PADIATAPA yang dilaksanakan oleh Organisasi.

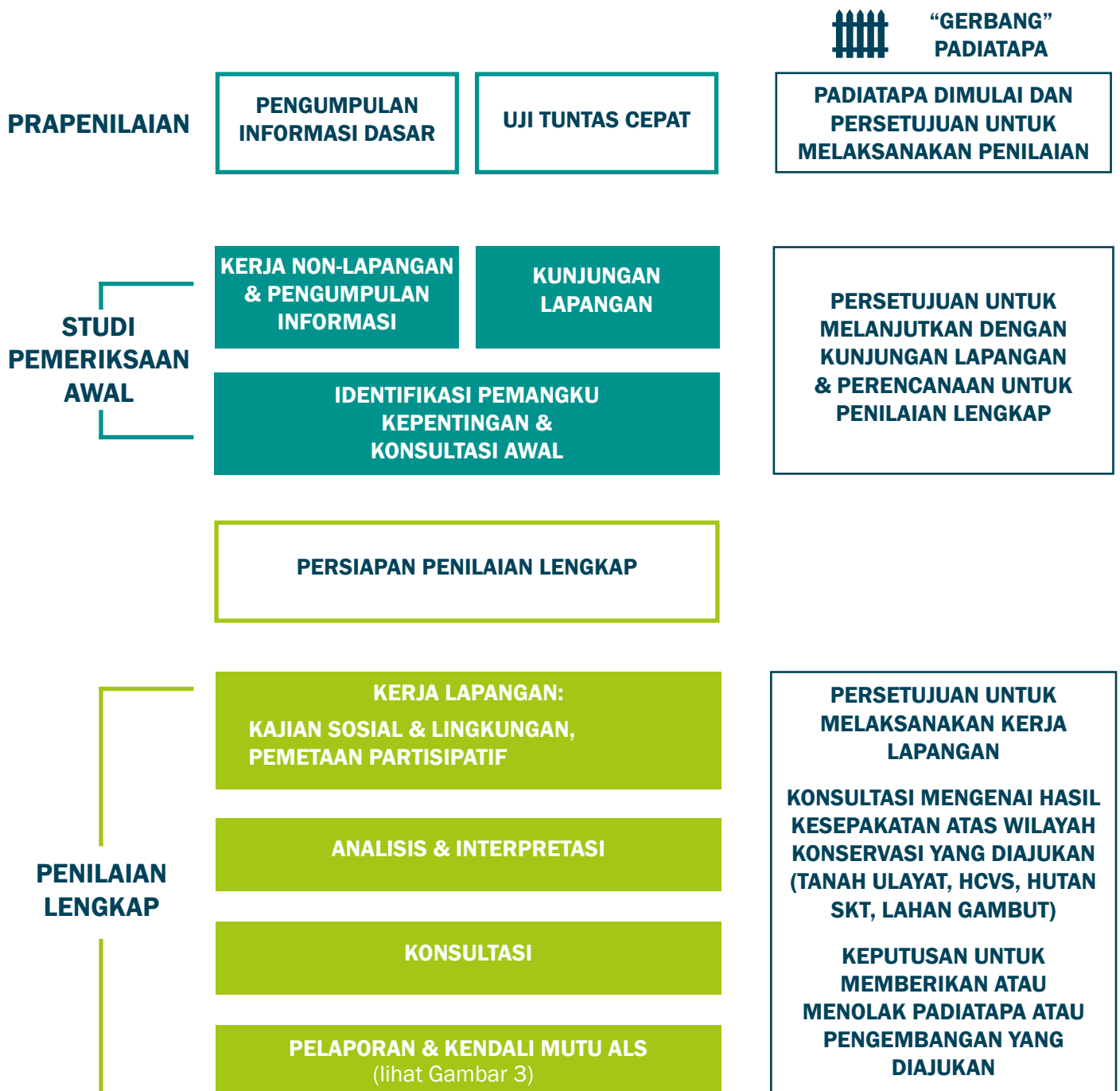
⁷ Tabel ini tidak mendaftarkan seluruh kegiatan, tapi bertujuan untuk memberikan contoh seperti apa perbedaan antara peran Organisasi dan tim penilaian terkait PADIATAPA.

Bagian 2: PENILAIAN NKT-SKT

2.1 PENDAHULUAN

Tiga fase utama penilaian NKT-SKT adalah: **prapenilaian, studi pemeriksaan awal, dan penilaian lengkap (Gambar 2)**. Pedoman ini kemudian membahas pelaporan dan kendali mutu ALS secara singkat. Persyaratan pelaporan yang mendetail terdapat di dalam Template Laporan Penilaian NKT-SKT. Setiap penilaian terpadu memiliki konteks yang berbeda-beda dan akan memerlukan beragam pendekatan praktis, seperti susunan kegiatan, jenis kajian yang dibutuhkan, dan jumlah kunjungan lapangan. Susunan ketiga fase utama penilaian (prapenilaian, studi pemeriksaan awal, penilaian lengkap) wajib diikuti, tetapi di dalam fase-fase tersebut, susunan dan pemilihan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang berbeda diserahkan kepada tim penilaian.

PROSES PENILAIAN NKT-SKT TERPADU



Gambar 2 Proses penilaian NKT-SKT yang terpadu dengan “gerbang” PADIATAPA

Tabel 3 menjelaskan rangkuman skematis bagaimana beragam kegiatan terhubung dengan pendekatan NKT dan SKT dan prinsip PADIATAPA di dalam langkah penilaian. Tabel ini tidak mendaftarkan seluruh kegiatan, tapi berfungsi sebagai pengingat bagaimana penilaian ini mengintegrasikan ketiga pendekatan atau prinsip.

Tabel 3 Rangkuman skematis menjelaskan bagaimana beragam kegiatan berhubungan dengan pendekatan NKT dan SKT dan prinsip PADIATAPA tercakup di dalam langkah-langkah penilaian.

LANGKAH PENILAIAN	PENDEKATAN NKT	PENDEKATAN SKT	PADIATAPA
Prapenilaian	- Memahami letak lokasi dan tutupan lahan. - Meminta informasi untuk mengkaji prasyarat.		Meminta rincian kegiatan PADIATAPA terbaru.
Studi pemeriksaan awal	- Penelitian berbasis meja (desktop research) dari nilai potensial - Kunjungan untuk memahami karakteristik sosial dan lingkungan di lokasi kegiatan dengan lebih baik	- Peta tutupan lahan dan pengembangan petak awal - Sampel kelas vegetasi yang sudah dicocokkan dengan kenyataan lapangan (ground-truth sample)	- Mendapatkan persetujuan untuk penilaian - Memeriksa apakah PADIATAPA telah dilaksanakan
Kerja lapangan (sosial & lingkungan)	- Pemetaan partisipatif - Kerja lapangan untuk mengumpulkan informasi mengenai NKT	- Mengidentifikasi tanah masyarakat lokal - Memverifikasi kajian lahan gambut - Inventarisasi hutan - Finalisasi peta tutupan lahan	- Mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan kerja lapangan - Membahas hasil kajian dan pemetaan
Analisis & interpretasi	- Mengidentifikasi kawasan NKT dan pengelolaan NKT - Rekomendasi	- Pohon keputusan analisis petak - Mengidentifikasi hutan SKT - Rekomendasi	- Keterlibatan masyarakat dalam hasil pohon keputusan - Konsultasi hasil
Konsultasi	Mengonsultasikan rekomendasi NKT dan pengelolaan	Mengonsultasikan rekomendasi pengelolaan SKT	- Konsultasi hasil - Memodifikasi peta dan rekomendasi sesuai
Pelaporan dan kendali mutu ALS			

2.2 PRAPENILAIAN: LANGKAH-LANGKAH PERTAMA SEBELUM MEMULAI PENILAIAN NKT-SKT

Sebelum memulai penilaian, ada beberapa hal yang harus dilakukan, baik dari sisi praktis (Di mana? Apa status eksplorasi, PADIATAPA, pengembangan, dll.?) dan sisi administratif (contohnya, penandatanganan kontrak).



2.2.1 Pengumpulan informasi dasar

Ketika penilai⁸ dihubungi oleh Organisasi yang tertarik untuk menunjuk penilai yang melaksanakan kajian, penilai harus mengumpulkan informasi dasar sebagai berikut:

1. Detail mengenai Wilayah Kepentingan/Area of Interest (AOI) termasuk setidaknya: dokumen spasial batas-batas (koordinat geografis dan wilayah) yang akurat. Walaupun AOI dapat ditentukan kemudian, ini harus mencakup konsesi dan lanskap lebih luas yang berdekatan dengan konsesi.
2. Peta tutupan lahan/penggunaan lahan terbaru (contoh, Landsat 8, Sentinel 2). Dibutuhkan citraan terbaru (yaitu, kurang dari 12 bulan).
3. Jenis proyek (terkini atau mendatang), contohnya, apakah untuk kelapa sawit, perkebunan kehutanan, keterlibatan petani kecil, dll.
4. Alasan penilaian NKT-SKT (contoh, kebijakan Organisasi).
5. Status penguasaan lahan (informasi awal mengenai siapa yang mengendalikan/memiliki/menggunakan lahan).
6. Rangkuman proses PADIATAPA yang sudah dilaksanakan (contoh, apakah persetujuan masyarakat untuk melanjutkan penilaian sudah didapatkan), termasuk pemangku kepentingan utama (masyarakat, lain-lain) yang terlibat.
7. Informasi mengenai masyarakat di dalam atau di sekitar AOI, jika ada.

2.2.2 Melaksanakan uji tuntas cepat

Pada saat penelitian berbasis meja awal, penilai harus melaksanakan uji tuntas cepat untuk memahami: komitmen apa yang telah dibuat Organisasi untuk keberlanjutan, kegiatan apa yang terjadi di lapangan, hak apa yang dimiliki Organisasi untuk mengeksplorasi atau mengembangkan wilayah, dan sejauh apa perkembangan Organisasi terkait proses PADIATAPA. Ini mencakup empat prasyarat yang ditunjukkan di tabel di bawah ini.

Tabel 4 menjelaskan contoh bukti yang dapat digunakan oleh penilai untuk menentukan apakah prasyarat sudah terpenuhi, tetapi tabel ini tidak memberikan informasi lengkap dan rinciannya mungkin berbeda-beda berdasarkan negara lokasi operasi dan lokasi penilaian. Ini merupakan praktik penelitian berbasis meja yang mengharuskan penilai untuk meminta bukti dari Organisasi untuk menentukan apakah prasyarat sudah terpenuhi. Ketika penilai berada di lapangan, penilai harus menggunakan triangulasi⁹ untuk menyelidiki lebih jauh apakah prasyarat memang telah terpenuhi.

⁸ Di dalam manual ini, istilah penilai dan tim penilaian dapat saling menggantikan. Pimpinan penilai terutama bertanggung jawab untuk kualitas laporan final, tetapi anggota-anggota tim penilaian akan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam penilaian bergantung pada keahlian mereka

⁹ Contohnya, melalui wawancara dengan pakar dan masyarakat lokal dan melalui kunjungan lapangan ke lokasi penilaian.

Tabel 4 Contoh bukti yang dapat dikumpulkan penilai untuk melaksanakan praktik uji tuntas.

PRASYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH ORGANISASI	CONTOH BUKTI YANG HARUS DIKUMPULKAN OLEH PENILAI
1. Komitmen terhadap pengamanan lingkungan dan sosial¹⁰	- Kebijakan Organisasi dan/atau pernyataan yang menjelaskan komitmen operasi Organisasi terhadap nilai inti yang ditanamkan di proses NKT, SKT, dan PADIATAPA: contohnya, keanekaragaman hayati dan pelestarian habitat, bebas deforestasi, perlindungan gambut, menghargai hak dan penguasaan tanah masyarakat, promosi mata pencaharian berkelanjutan - Jika Organisasi adalah anggota SKT, ini juga akan menunjukkan tingkat komitmen terhadap pengamanan lingkungan dan sosial (tetapi keanggotaan SKT tidak bersifat wajib)
2. Moratorium untuk pembukaan atau persiapan lahan sampai Rencana Konservasi dan Penggunaan Lahan Terpadu (ICLUP) yang diajukan selesai disusun ¹¹	- Deklarasi dari Organisasi (contoh, surel, kebijakan di situs) - Peta tutupan lahan atau analisis perubahan penggunaan lahan terbaru (yang menunjukkan pembukaan lahan belum dimulai) - Peta historis (dinamika penggunaan lahan) atau analisis cepat sejarah Google Earth
3. Hak hukum yang jelas atas atau izin untuk mengeksplorasi Wilayah Kepentingan (AOI)	- Penilaian penguasaan lahan (rincian selanjutnya dijelaskan di bawah ini) - Sertifikat, sewa, perizinan perencanaan, kesepakatan konsesi, izin eksplorasi, izin dari pemilik lahan sekarang, dll. - Kesepakatan atau MOU dari pemilik lahan yang memberikan izin untuk melaksanakan penilaian yang akan menginformasikan pengembangan potensial di lahan mereka
4. Proses PADIATAPA telah dilaksanakan dengan pengungkapan seluruh informasi proyek kepada semua masyarakat dan pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak, serta proses negosiasi dan persetujuan untuk melanjutkan telah disetujui, dengan perwakilan yang ditunjuk melalui proses yang adil	- Kerangka waktu proses PADIATAPA yang dilaksanakan oleh Organisasi Dokumentasi mungkin akan terdiri dari: - Penjelasan proyek kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak (contohnya, menit pertemuan) - Bagaimana masyarakat dan pemangku kepentingan lain akan mewakili diri mereka dan bagaimana mereka akan terlibat dalam proses penilaian - Siapa yang akan mereka libatkan sebagai penasehat atau penasehat hukum (jika sesuai) - Bagaimana informasi proyek akan disebarluaskan - Akan dicari prosedur persetujuan keseluruhan untuk proyek dan rencana konservasi yang diajukan - Persetujuan dari masyarakat yang terkena dampak untuk melanjutkan penilaian NKT-SKT - MOU yang ditandatangani antara Organisasi dan masyarakat

¹⁰ Di sini penilai hanya mencari bukti komitmen bukan kepatuhan.

¹¹ Pendekatan SKT sedang mengembangkan petunjuk dan prosedur jaminan kualitas untuk finalisasi ICLUP yang diajukan. Sebelum ICLUP yang diajukan difinalisasi, persiapan lahan dapat hanya dilaksanakan di wilayah yang telah mendapatkan PADIATAPA dan ketika tidak ada sengketa atau pun konflik dalam penggunaan lahan.

¹² Organisasi dapat menggunakan penilaian NKT-SKT sebagai cara untuk mengetahui apakah suatu proyek dapat bertahan secara finansial.

Di akhir langkah persiapan, sesudah penilai mendapatkan beberapa informasi dasar mengenai lokasi penilaian dan melaksanakan uji tuntas cepat, penilai akan menentukan apakah proses kemudian dilanjutkan dengan kontrak studi pemeriksaan awal. Jika ada prasyarat di atas yang tidak terpenuhi (minimal terdapat informasi awal yang memuaskan), penilai tidak akan melanjutkan ke penilaian SKT-SKT. Sebaliknya, jika dapat dilakukan, penilai pertama-tama harus membahas proses dengan Organisasi mengenai prasyarat mana yang dapat dipenuhi sebelum menandatangani kontrak penilaian NKT-SKT.



PADIATAPA DILAKSANAKAN & PERSETUJUAN UNTUK MELAKSANAKAN PENILAIAN DIDAPATKAN

Dokumen Acuan

- Modul 5 Set Alat SKT
- Panduan Umum untuk Identifikasi NKT (Bagian 3)

2.2.3 Melanjutkan dengan penilaian NKT-SKT

Penilai yang memegang lisensi harus memastikan bahwa Organisasi yang menunjuk penilai yang melaksanakan penilaian memahami hal-hal di bawah ini dengan baik:

- Proses dan kegiatan yang termasuk di penilaian NKT-SKT.
- Tujuan, persyaratan, dan alat ALS, termasuk biaya untuk kendali mutu laporan kinerja, waktu yang diperlukan, hasil potensial, dan penggunaan landasan (platform) situs ALS untuk mengawasi status laporan
- Rekomendasi pengelolaan dan pengawasan akan dibuat berdasarkan penilaian dan ini harus dikembangkan lebih jauh, diperbaiki, dan diimplementasikan oleh Organisasi di luar cakupan penilaian NKT-SKT.

Kontrak antara penilai dan Organisasi harus dengan jelas menyatakan peran dan tanggung jawab kedua pihak. Para penilai disarankan untuk menggunakan kontrak terpisah untuk studi pemeriksaan awal dan penilaian lengkap. Jika ini tidak mungkin dilakukan, maka kontrak harus memiliki klausul yang memungkinkan penilai untuk dibebaskan dari kontrak sesudah pelaksanaan studi pemeriksaan awal jika hasil menunjukkan bahwa penilaian lengkap tidak layak untuk dilakukan (contohnya, PADIATAPA tidak dilakukan dengan seharusnya, tidak ada persetujuan untuk penilaian lengkap, dll.).



2.3 STUDI PEMERIKSAAN AWAL

Kegiatan studi pemeriksaan awal melibatkan pengumpulan informasi nonlapangan, analisis awal tutupan lahan, kunjungan lapangan, serta identifikasi dan konsultasi pemangku kepentingan. Kegiatan ini juga dipakai sebagai alat untuk menentukan apakah penilaian lengkap harus dilaksanakan, dan jika harus, kegiatan ini mempersiapkan tim penilaian untuk melaksanakan penilaian lengkap. **Studi pemeriksaan awal wajib dilakukan untuk semua penilaian NKT-SKT** karena: tutupan lahan awal harus dicocokkan dengan kenyataan di lapangan (ground-truthing) sebelum penilaian lengkap dilaksanakan, dan penting untuk memeriksa apakah informasi yang dikumpulkan pada saat prapenilaian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Studi pemeriksaan awal tidak berarti hanya akan ada satu kali kunjungan lapangan; kunjungan lapangan mungkin harus dilakukan lebih dari sekali untuk menyediakan cukup waktu untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam persiapan penilaian lengkap. Kerja lapangan untuk studi pemeriksaan awal dilaksanakan oleh tim kecil yang beranggotakan para pakar (setidaknya 2 orang). Ini dapat melibatkan pimpinan penilai, tapi tidak

wajib dilakukan jika ada anggota tim lain dengan pengalaman dan keahlian yang relevan untuk memimpin kerja pelingkupan di lapangan. Tim juga sebisa mungkin harus memiliki anggota yang memahami peta tutupan lahan dan cara mencocokkannya dengan kenyataan lapangan. Tim pelingkupan harus dilengkapi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan lokal (contohnya, kemampuan bahasa, fasilitas masyarakat, medan setempat). Pertimbangan logistic, seperti ukuran lokasi dan akses ke lokasi (contoh, kondisi jalan), akan memengaruhi perencanaan studi pemeriksaan awal dan biasanya Organisasi yang menunjuk penilai yang melaksanakan penilaian akan membantu memenuhi kebutuhan logistik.

2.3.1 Menetapkan cakupan penilaian

AOI yang akan dipetakan oleh satelit harus mencakup konsesi dan lanskap yang lebih luas yang berbatasan dengan konsesi. Batasan AOI harus disesuaikan dengan batasan administratif atau alami, contohnya daerah tangkapan hidrologis atau unit lanskap lain. Dasar penetapan batas-batas ini harus dijelaskan.

Lanskap yang lebih luas dapat ditentukan dengan (a) mengidentifikasi DAS atau unit dataran geografis yang memiliki klaster ekosistem yang saling berinteraksi; (b) memilih ukuran unit yang mencakup konsesi perkebunan dan penyangga wilayah sekitarnya (contoh, 50.000 atau 100.000 ha) atau (c) menggunakan radius 5 km dari konsesi. Dasar penetapan batas-batas ini harus dijelaskan.

2.3.2 Pengumpulan informasi

Ada tiga jenis informasi utama yang dibutuhkan untuk penilaian: data lingkungan, data sosial, dan data geospasial. Langkah pertama adalah menyusun semua sumber informasi yang relevan dengan AOI dan lanskap yang lebih luas. Ini meliputi data dari kajian yang sudah diterbitkan dan tidak diterbitkan, laporan penelitian, dan sumber terkait lainnya. Semua data atau sumber harus terkini, objektif, dan mendetail. Pengumpulan data primer oleh tim penilaian akan membentuk dasar untuk identifikasi NKT dan klasifikasi hutan SKT. Namun, penggunaan data sekunder juga dapat diterima (contohnya, laporan ESIA terbaru) sepanjang penggunaannya terjustifikasi dan terdokumentasikan dengan baik.

Penilai mengajukan permintaan data kepada Organisasi dengan tujuan untuk mengakses set data apa pun yang dianggap berguna oleh penilai untuk melaksanakan penilaian (contohnya, data berbasis vektor, yaitu hidrologi, transportasi, topografi). Organisasi juga dapat memberikan rencana pengembangan ekonomi mereka, peta dasar (baseline) perkebunan, wilayah konsesi yang diajukan, dan lanskap yang lebih luas. Sebagai tambahan dari informasi yang berasal dari Organisasi, tim penilaian bisa mendapatkan informasi dari sumber yang terdapat di dalam Tabel 5. Silakan rujuk Panduan Umum Identifikasi NKT (Bagian 3) untuk rekomendasi tambahan sumber informasi.

Pakar sosial dan lingkungan lokal adalah sumber daya manusia penting dan dapat diajak berkonsultasi pada tahap ini dan pada langkah analisis. Tim penilaian harus meninjau dan membuat sintesis dari data yang tersedia untuk memahami konteks lingkungan dan sosial di wilayah konsesi dan lanskap yang lebih luas. Analisis kesenjangan (gap analysis) kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan data yang tersisa.

Tabel 5 Contoh beragam informasi dan sumber data untuk dipakai pada saat penilaian NKT-SKT.

DATA LINGKUNGAN	DATA SOSIAL	DATA GEOSPASIAL
Dokumen dan kajian: - Kajian biologis - IUCN Red List (daftar spesies terancam kritis) dan peta - Daftar CITES - Peta Wilayah Keanekaragaman Hayati Penting - Daftar spesies yang dilindungi pemerintah nasional - Peta wilayah terlindungi - Analisis rencana, kebijakan, dan peraturan lingkungan yang relevan Informasi: - Topografi dan kemiringan - Tutupan vegetasi - Tanah (terutama gambut) Hidrologi (termasuk drainase) - Sejarah gangguan hutan	Kajian dan dokumen: - Kajian dasar sosial - SIA - Penilaian penguasaan lahan - Kajian sosio-ekonomi - Rencana sosial dan pembangunan yang resmi, kebijakan yang relevan dan Informasi: - Lokasi desa - Pemetaan pemangku kepentingan - Demografi - Etnografi - Data penguasaan lahan - Kadaster tanah - Latar belakang bahasa - Latar belakang budaya - Kajian etno-botani - Status sosio-ekonomi dan kebutuhan pembangunan	- Model Elevasi Digital - Rencana pengembangan organisasi - Citraan satelit (e.g. Landsat/Sentinel) - Data LiDAR (jika tersedia) - Peta tutupan lahan awal - Batas-batas administratif - Batas-batas konsesi lain - Batas-batas wilayah terlindungi - Peta moratorium (jika sesuai) - Peta hutan dan wilayah negara - Peta sistem lahan - Peta perencanaan spasial Wilayah fisiografi - Peta wilayah konservasi

2.3.3 Peta tutupan lahan awal dan analisis petak

Peta tutupan lahan yang akurat merupakan kunci penilaian NKT-SKT. Pakar SIG/penginderaan jarak jauh harus menyiapkan klasifikasi vegetasi awal berdasarkan analisis penginderaan jarak jauh sesuai dengan persyaratan Modul 4 Set Alat SKT. Rancangan peta tutupan lahan dihasilkan dari klasifikasi vegetasi awal ini. Peta tutupan lahan awal harus dibuat segera untuk memfasilitasi perencanaan yang efisien dari lahan kalibrasi biomassa permukaan tanah (above ground biomass / AGB) LiDAR, transek LiDAR, atau lahan inventarisasi hutan (bergantung pada pilihan data terpilih), dan untuk meningkatkan distribusi sampel di dalam rentang kelas cadangan karbon (lihat Modul 4 Set Alat SKT). Penilaian akurasi awal dari peta tutupan lahan LiDAR dapat dilakukan menggunakan citraan satelit. Pencocokan data dengan kenyataan di lapangan dilaksanakan sebagai bagian dari pelingkupan, tetapi lahan kalibrasi AGB/LiDAR dilaksanakan pada saat penilaian lengkap. Berdasarkan klasifikasi vegetasi awal, analisis petak awal (preliminary patch analysis) dapat dilaksanakan (sesuai Modul 5 SKT) untuk menyediakan informasi dalam perencanaan kunjungan lapangan pada kunjungan pelingkupan.

Direkomendasikan untuk membuat klasifikasi tutupan lahan yang lebih jelas dan terpisah untuk NKT (contohnya, memisahkan dataran

13 Melaksanakan pemetaan drainase mendetail dalam fase prapenilaian sangat berguna. Beberapa pemukiman dapat secara tidak langsung terpengaruh oleh pembangunan baru, berdampak pada kualitas air. Pemetaan drainase dapat membantu untuk mencari pemukiman yang mungkin terkena dampak.

Dokumen Acuan

- Modul 4 & 5 Set Alat SKT

kering dari gambut atau hutan rawa, dari hutan riparian, dll.). Analisis petak awal selanjutnya dilaksanakan untuk membuat petak atau pengelompokan lokasi kelas-kelas hutan yang berbeda atau bukan hutan untuk memudahkan penilaian lapangan¹⁴.

2.3.4 Kunjungan lapangan



Catatan: Penting bagi Organisasi untuk mengunjungi masyarakat sebelum penilai tiba untuk melakukan dialog dua arah terkait proyek yang diajukan serta proses yang disepakati bersama untuk mendapatkan persetujuan atas proyek dan fase pengembangan proyek, termasuk kunjungan penilai.

Kunjungan lapangan berperan penting untuk membantu memahami medan dan tutupan lahan di dalam AOI. Ini membantu penilai untuk merencanakan penilaian lengkap. Penilai mendapatkan pengetahuan mendetail mengenai lingkungan setempat, memungkinkan tim untuk menentukan: pakar yang diperlukan untuk studi lapangan¹⁵, pengambilan sampel lokasi lahan, akses ke lahan percontohan, protokol pengujian inventarisasi hutan, lokasi masyarakat, akses ke masyarakat, dan status proses PADIATAPA.

2.3.4.1 Identifikasi dan konsultasi pemangku kepentingan

Konsultasi pada saat studi pemeriksaan awal dipakai untuk mengumpulkan informasi mengenai situasi sosial dan lingkungan di wilayah penilaian dan mengidentifikasi kecemasan dan rekomendasi terkait penilaian dan proyek (yaitu produksi komoditas).

Ini adalah saat untuk melaksanakan konsultasi awal dengan misalnya:

- Masyarakat lokal (lihat rincian di bawah ini)
- Pakar sosial dan lingkungan yang mungkin akan bergabung dengan tim penilaian lengkap atau yang memiliki data atau informasi dan/atau kecemasan untuk dibagi
- Pemangku kepentingan, secara lebih umum, untuk memahami kecemasan awal terkait proyek

KOTAK 2: KELOMPOK PEMANGKU KEPENTINGAN

Pakar sosial (atau pakar-pakar sosial) di dalam tim penilaian mengidentifikasi beragam pemangku kepentingan untuk diajak berkonsultasi dan bekerja sama pada saat penilaian. Contohnya, penting untuk melakukan pertemuan dan membahas proyek dan penilaian yang diajukan dengan:

- Masyarakat yang terkena dampak (pertimbangkan subkelompok, contohnya pria, wanita, generasi muda, lansia, kelompok minoritas)
- Pemerintah nasional dan daerah
- LSM dan masyarakat madani
- Pimpinan proyek pembangunan
- Pelaku sektor swasta lain yang berkepentingan di wilayah tersebut

¹⁴ Sesudah studi lapangan dilaksanakan di dalam penilaian lengkap dan finalisasi tutupan lahan diselesaikan, analisis SIG akan melaksanakan analisis petak lengkap..

¹⁵ Hal ini terutama penting terkait dengan keahlian sosial (contoh, anggota masyarakat yang fasih bahasa lokal, familier dengan konteks sosial, dan dipercaya oleh masyarakat lokal).



2.3.4.2 Mengunjungi sampel masyarakat

Mengunjungi masyarakat akan memungkinkan tim penilaian untuk memeriksa status PADIATAPA dan mempersiapkan kerja lapangan (contoh, kajian sosial untuk mengidentifikasi NKT 5&6). Penilai harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum menemui masyarakat lokal, contohnya, mungkin dibutuhkan kehadiran penerjemah. Memutuskan masyarakat yang mana (contohnya, desa) yang akan dikunjungi pada studi pemeriksaan awal bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- Mengunjungi pemukiman dengan masyarakat yang lahannya atau wilayah tanah adatnya akan terkena dampak oleh proyek (yaitu, masyarakat menyewakan sebagian atau seluruh tanah mereka kepada Organisasi).
- Mengunjungi pemukiman yang terdaftar sudah terlibat di dalam proses PADIATAPA (berdasarkan informasi yang diberikan oleh Organisasi pada langkah uji tuntas).
- Mengunjungi pemukiman yang berdekatan atau tumpang tindih dengan lokasi pencocokan informasi vegetasi di lapangan yang direncanakan.¹⁶

Menjelaskan tujuan dan kegiatan penilaian NKT-SKT

Penilai harus merencanakan cara yang tepat untuk menjelaskan tujuan dan kegiatan penelitian yang diajukan dan membahas hutan dan sumber daya bersama masyarakat. Ketimbang memborbardir anggota masyarakat dengan istilah teknis dan grafik, lebih baik jika masyarakat memiliki pemahaman konseptual yang baik mengenai pendekatan NKT dan SKT dan kegiatan yang tercakup di dalam penilaian serta implikasi di masa depan dari penggunaan lahan dan sumber daya alam (SDA), termasuk peran masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan. Penilai harus menggambarkan dengan jelas proses penilaian yang diajukan, termasuk kunjungan lapangan dari beragam pakar, langkah-langkah konsultasi, dan persetujuan final (atau tidak ada persetujuan) dari masyarakat lokal.

Memeriksa status PADIATAPA dan kajian sosial

Tim penilaian harus memverifikasi bahwa masyarakat telah mendapatkan informasi mengenai proyek yang diajukan oleh Organisasi dan masyarakat memahami lokasi, skala, serta tujuan pengembangan dan konservasi yang diajukan dan memberikan persetujuan untuk penilaian NKT-SKT. Harus ada dokumentasi terperinci dari semua konsultasi ini (Lihat Lampiran 4 untuk persyaratan dokumentasi). Verifikasi dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan bersama sampel masyarakat untuk memastikan bahwa pelibatan awal dan pengungkapan informasi yang selaras dengan persyaratan prinsip PADIATAPA telah dilaksanakan. Contoh hal yang harus diperiksa:

- Apakah masyarakat mengajukan perwakilan mereka sendiri?
- Apakah ada acuan spesifik yang menjelaskan bahwa pemilik tanah adat diberitahu bahwa mereka bisa menolak rencana pengembangan atau konservasi?

Sebelum Organisasi bisa mulai mengakuisisi lahan, mereka harus memahami siapa yang sudah memiliki hak sebagai pemilik dan pengguna atas tanah yang mana, termasuk pemegang hak resmi,

¹⁶ Jika ada wilayah yang dianggap menarik oleh tim penilaian terkait tutupan lahan dan kelas hutan, mereka dapat merencanakan untuk bertemu dengan masyarakat di dekat lokasi-lokasi tersebut dan mendapatkan persetujuan untuk mengunjungi wilayah-wilayah tersebut.

Dokumen Acuan

- Modul 2 Set Alat SKT

pemegang hak ulayat, dan pemegang hak tidak resmi. Periksa apakah penilaian penguasaan lahan telah dilaksanakan. Penilaian penguasaan lahan harus mengklarifikasi lembaga mana yang berwenang atas lahan dan siapa yang mengendalikan bagaimana cara lahan ini didapatkan, diwariskan, dan ditransfer. Jika penilaian penguasaan lahan belum dilaksanakan, maka penilaian tidak dapat dilanjutkan.

KOTAK 3 PEMETAAN PARTISIPATIF

Pada saat menjelaskan alat SKT dan Pedoman NKT-SKT, pemetaan partisipatif sering dibahas. Apa saja yang tercakup di dalamnya? Siapa yang harus melaksanakannya? Kapan ini harus dilaksanakan? Pemetaan partisipatif adalah alat mengidentifikasi dan memetakan penggunaan, hak, serta kepemilikan lahan dan SDA masyarakat. Ini merupakan metode yang didasarkan pada pengetahuan lokal dan menetapkan masyarakat lokal sebagai kelompok pemangku kepentingan utama dalam pemetaan. Pemetaan partisipatif dapat dilakukan di tingkat berbeda, mulai dari peta umum yang menunjukkan wilayah yang lazim digunakan masyarakat sampai peta lebih rinci yang menunjukkan lokasi yang dianggap keramat, wilayah perburuan, dan sumber mata air alami untuk kebutuhan air minum. Ini bisa mencakup berbagai metode dan kerangka waktu.

Sebagai tambahan untuk Modul 2 Set Rangkaian Alat SKT, petunjuk pelaksanaan syarat sosial SKT sedang dikembangkan, yang akan menjelaskan lebih jauh mengenai cara dan kapan pemetaan partisipatif harus dilaksanakan sebagai bagian dari SKT. Namun, mengingat tujuan Pedoman ini dan agar penilai mampu mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai apa yang dibutuhkan, berikut hal-hal yang perlu dipertimbangkan:

- **organisasi harus terlibat dalam pemetaan partisipatif sejak tahap awal untuk menentukan bagaimana masyarakat setempat menggunakan wilayah mereka (penggunaan adat dan/atau hak hukum negara) tumpang tindih dengan konsesi di mana produksi komoditas direncanakan/diajukan oleh Organisasi;**
- **pada saat studi penilaian awal, penilai harus memverifikasi bahwa pemetaan partisipatif awal telah dilaksanakan (yaitu, memeriksa bukti pemetaan, dan keterlibatan masyarakat lokal, serta memvalidasi peta) dan masyarakat lokal telah menyetujui pemetaan/penilaian lanjutan sebagai bagian dari proyek pengembangan potensial di masa mendatang, yang berhak masyarakat untuk setuju atau tolak. Jika disetujui, maka penilaian NKT-SKT dapat dilanjutkan. Jika tidak, penilaian tidak bisa dilanjutkan dan tanggung jawab dikembalikan kepada Organisasi untuk melakukan penilaian penguasaan lahan lewat pemetaan partisipatif**

Jika penilaian dilanjutkan:

- penilai dapat menggunakan peta partisipatif untuk mulai mengidentifikasi nilai dan lokasi tertentu (contoh, NKT);
- masyarakat lokal boleh memutuskan memilih untuk mengecualikan sebagian wilayah dari pemetaan dan penilaian terperinci.

¹⁷Jika pemetaan partisipatif telah dilaksanakan oleh Organisasi, hasilnya dapat dipakai, tapi harus divalidasi oleh tim penila untuk memastikan pemetaan ini dilakukan dengan baik (contohnya, berdiskusi dengan masyarakat yang berpartisipasi, memeriksa sampel peta, dll).



2.3.4.3 Pencocokan awal peta tutupan lahan dengan kenyataan di lapangan

Kunjungan lapangan merupakan kesempatan melakukan pencocokan informasi awal dari rancangan peta tutupan lahan, serta kalibrasi LiDAR atau data/citraan lain. Pakar SIG/penginderaan jauh yang menyiapkan peta tutupan lahan dan stratifikasi hutan harus mendukung tim pencocokan informasi dan membuat perubahan yang dibutuhkan di peta.

Catatan: Meski Organisasi telah mendapatkan persetujuan melaksanakan penilaian, persetujuan masyarakat lokal harus didapatkan sebelum memasuki lahan pertanian atau hutan kemasyarakatan untuk melaksanakan pencocokan informasi dan kajian vegetasi. Bahkan untuk kajian yang dilaksanakan di wilayah pribadi, upayakan berhubungan sesering mungkin dengan masyarakat yang menggunakan lahan atau SDA di AOI sesering mungkin. Ini berlaku untuk kunjungan lapangan/masyarakat di semua fase penilaian.

Pada saat pencocokan informasi, salinan peta dasar dan hasil cetak peta tutupan lahan akan bermanfaat. Perlengkapan survei standar terdiri dari GPS, kompas, altimeter, klinometer, dan kamera digital. Tugas utama yang harus dilakukan pada saat pencocokan informasi adalah penilaian visual untuk menentukan akurasi batas-batas strata yang ditetapkan melalui analisis SIG dari citraan satelit. Titik verifikasi biasanya terletak di batas dua strata atau di mana tutupan lahan tidak dapat ditentukan dari data penginderaan jarak jauh (misalnya, karena tidak ada data satelit). Tiap titik lokasi verifikasi (koordinasi) harus direkam menggunakan GPS dan foto yang diambil dari lima arah yaitu utara, selatan, timur, barat, dan ke arah langit. Tugas lain yang perlu dilaksanakan saat pencocokan informasi adalah penilaian visual jenis tanah dengan memperhatikan keberadaan tanah gambut¹⁸. Informasi dari praktik pencocokan informasi dengan kenyataan di lapangan harus dicatat di lembar data standar. Kesalahan apa pun di peta tutupan lahan yang ditemukan pada saat studi pemeriksaan awal harus dikoreksi oleh ahli SIG/penginderaan jarak jauh. Sesudah informasi ini diperbarui, analisis petak awal bisa kemudian direvisi. Tim penilai juga dapat mengidentifikasi lokasi potensial untuk lahan biomassa dan strategi pengambilan sampel untuk penilaian lengkap (lihat Modul 4 SetAlat SKT). Hal lain yang mungkin dilakukan adalah menetapkan lahan bidang (field plot) awal ketika persetujuan telah diberikan dan jika waktu memungkinkan mendokumentasikan biomassa dan data ekologis (sesuai persyaratan Modul 4 SKT).

Dokumen Acuan

- Modul 4 Set Alat SKT

2.3.4.4 Identifikasi fitur biofisika dan ekologis

Melaksanakan penjajakan di wilayah penilaian untuk mengetahui karakterisasi kelas vegetasi utama dan bentuk lahan, untuk menyiapkan metode inventarisasi biologis.

- Mengunjungi semua ekosistem nonhutan yang harus dicantumkan dalam penilaian NKT (contoh, sabana, sungai, lahan basah).
- Memahami/memetakan titik akses ke wilayah penilaian (jalan, sungai) untuk membantu perencanaan penilaian lengkap.

¹⁸ Catat tutupan lahan/penggunaan lahan, serta status drainase. Untuk lahan gambut berhutan yang dikeringkan, wilayah ini harus dibuat kembali basah serta dilindungi.

2.3.5 Hasil studi pemeriksaan awal

Hasil studi pemeriksaan awal adalah laporan pelingkupan. Laporan ini dapat dibuat tertulis atau presentasi yang dibagikan kepada Organisasi dan pemangku kepentingan lain yang berkepentingan. Laporan pelingkupan ini berguna untuk berkomunikasi dengan Organisasi dan merencanakan penilaian lengkap. Laporan ini dapat ditulis ringkas tetapi harus mencantumkan informasi berikut ini:

- rangkuman keseluruhan dari kesimpulan studi pemeriksaan awal dan kesenjangan informasi yang harus diperhatikan dan ditangani pada saat penilaian lengkap;
- rekomendasi (jika ada) tentang hal-hal yang harus dilengkapi Organisasi sebelum melakukan penilaian lengkap, seperti pemetaan partisipatif wilayah yang dimanfaatkan masyarakat harus dikecualikan dari pengembangan;
- kerangka waktu dan kegiatan studi pemeriksaan awal;
- rangkuman lokasi yang dikunjungi (contohnya desa, kelas vegetasi, eksplorasi wilayah, lokasi kepentingan lain, biofisika penting, dan fitur ekologis);
- konsultasi;
- verifikasi uji tuntas;
- foto pencocokan informasi di lapangan dan observasi peta tutupan lahan;
- proposal studi lapangan, termasuk metodenya.

Laporan pelingkupan tidak diserahkan kepada ALS untuk kendali mutu. Namun, **di dalam templat laporan penilaian terdapat bagian studi pemeriksaan awal yang harus dilengkapi dan bagian ini penting untuk tujuan kendali mutu.**



GERBANG PADIATAPA UNTUK MASYARAKAT

Persetujuan masyarakat diperlukan pada tahap studi pemeriksaan awal ini, termasuk kesepakatan mengenai:

- bagaimana masyarakat akan mewakilkan diri dalam pengembangan proyek, termasuk proses penilaian;
- kemungkinan tim lapangan melaksanakan pemetaan partisipatif dan studi lapangan (contoh, kajian NKT dan lahan pengukuran hutan SKT);
- bagaimana masyarakat akan terlibat dalam proses-proses ini;
- siapa yang ingin mereka tunjuk sebagai penasihat atau pengacara;
- bagaimana informasi proyek (termasuk dari kajian NKT dan SKT) akan disebarakan;
- menentukan prosedur mendapatkan persetujuan keseluruhan atas rencana pengembangan dan konservasi yang diajukan.

Beberapa kelompok masyarakat mungkin setuju berpartisipasi dalam penilaian NKT-SKT, tetapi sebagian lainnya mungkin menolak memberi persetujuan.



Organisasi

Temuan studi pelingkupan akan memberi informasi Organisasi terkait mengenai kemungkinan keberadaan kawasan NKT dan SKT. Kemudian Organisasi dapat mengevaluasi kelayakan ekonomi dari proyek potensial tersebut dan memutuskan apakah akan melanjutkan dengan penilaian lengkap atau tidak. Contohnya, wilayah konsesi mungkin dipenuhi hutan NKT atau SKT yang membutuhkan perlindungan, yang berarti melanjutkan pengembangan wilayah dari segi ekonomi mungkin tidak layak untuk dilakukan.

Penilai

Sesudah studi pemeriksaan awal, penilai dapat mengevaluasi apakah penilaian dapat dilanjutkan. Contohnya, jika penilai yakin bahwa prasyarat dari praktik uji tuntas masih belum terpenuhi, penilai dapat memutuskan tidak melanjutkan proses penilaian.



2.4 PERSIAPAN UNTUK PENILAIAN LENGKAP

Sesudah studi pemeriksaan awal diselesaikan dan diambil keputusan untuk melanjutkan, tim sekarang harus menyiapkan penilaian lengkap. Bagian ini menyoroti beberapa tugas penting yang harus diselesaikan sebelum penilaian, tetapi penilai disarankan menggunakan **Daftar Perencanaan Penilaian NKT-SKT** (lihat Lampiran 2) dan mempertimbangkan topik yang relevan.

2.4.1 Mendaftar dengan ALS

Sesudah penilai mengetahui penilaian lengkap akan dilaksanakan, penilai harus mendaftarkan penilaian di Jaringan Sumber Daya NKT ALS. Ini akan memungkinkan ALS merencanakan dan bersiap menerima laporan penilaian dan meninjau laporan tepat waktu. Penilai harus masuk mendaftarkan penilaian lewat akun mereka di situs ALS.

2.4.2 Tim penilaian

Ini merupakan waktu finalisasi tim penilaian dan memastikan semua staf kunci tersedia. Komposisi tim penilaian, termasuk kualifikasi mereka berperan penting terhadap kesuksesan proses penilaian. Silakan rujuk kerangka acuan kerja (ToR) tim penilaian NKT-SKT (Lampiran 1) untuk petunjuk komposisi tim. Format laporan penilaian terdiri dari informasi anggota tim penilai, termasuk: nama, kualifikasi relevan (contohnya, cantumkan daftar pemegang lisensi ALS), lembaga asal anggota tim (jika relevan), peran (contohnya, pimpinan tim, pakar sosial, pakar survei lapangan), dan keahlian (contohnya, pengindraan jarak jauh, pemetaan partisipatif, taksonomi tanaman, hidrologi, dll.). Laporan ini harus mencatumkan profil keahlian singkat setiap anggota tim (lihat templat laporan).

2.4.3 Mempersiapkan metode

Pimpinan penilai harus mengoordinasi persiapan metode pengumpulan dan analisis data yang relevan dengan identifikasi NKT dan SKT.

Pemilihan dan penggunaan metode berperan penting dalam kendali mutu ALS. Laporan penilaian akan dievaluasi berdasarkan:

- **Deskripsi metode (dengan metode lengkap tersedia di lampiran);**
- **Alasan pemilihan metode (merujuk pada kekuatan atau keterbatasan metode tersebut, kesesuaian dengan konteks).**

Penilai harus memilih metode dan strategi pengambilan sampel dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- karakteristik lokasi;
- penggunaan waktu dan sumber daya lain secara efisien. Salah satu tujuan integrasi penilaian NKT dan SKT adalah membuat pengumpulan dan analisis data lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap studi lapangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga memaksimalkan waktu dan sumber daya. Pengumpulan data lapangan yang efisien juga bermanfaat bagi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lain karena dapat mencegah pengulangan konsultasi dan kunjungan. Penilaian NKT-SKT juga dapat diselaraskan dengan persyaratan nasional, seperti Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan;
- kunjungan lapangan pada saat penilaian lengkap mungkin harus dilakukan lebih dari satu kali dan kunjungan ini bermanfaat,



misalnya ketika tim harus mendapatkan persetujuan untuk dapat mengakses lokasi (contoh, pemilik lahan tidak hadir, batas-batas tidak sepenuhnya jelas, konflik lahan, dll.).

Rancangan dan metode pengambilan sampel harus disiapkan sebelum kerja lapangan dimulai dan anggota tim yang memiliki kualifikasi atau pakar mandiri harus melaksanakan tugas ini. Pada umumnya, pilihan metode diserahkan kepada penilai dengan beberapa pengecualian berikut ini:

- 1. Stratifikasi hutan dan penilaian karbon:** Silakan baca rincian metode di Modul 4A SetAlat SKT. Pilihan metode Opsi 1, 2, atau 3 harus disertai alasan kuat.
- 2. Pemetaan partisipatif penggunaan tanah masyarakat dan SDA (contoh, NKT 4, 5, dan 6) harus berdasarkan SIG.**

Merencanakan kajian sosial, pemetaan partisipatif, dan konsultasi masyarakat akan meliputi pemilihan masyarakat mana yang harus dikunjungi dan keperluan logistik terkait kegiatan tersebut. Ini meliputi:

- memahami cara masyarakat mengorganisir diri menghubungi orang-orang tepat yang akan mengatur pertemuan dan mengundang anggota masyarakat terkait. Dengan demikian, tim penilai harus memverifikasi bahwa pemilihan anggota masyarakat ini telah mencakup kelompok minoritas, rentan, dan marginal;
- mengidentifikasi apakah ada hari atau waktu untuk tidak melaksanakan pertemuan, contohnya, hari perayaan agama atau ketika semua orang bekerja;
- mengatur tim pemetaan.

Sebelum penilaian lengkap, lengkapi atau persiapkan hal-hal berikut:

- dapatkan persetujuan melanjutkan dengan kegiatan penilaian lengkap (lokasi penelitian, pengumpulan data, pemetaan, pertemuan tambahan);
- selesaikan pra-penelitian (contohnya, uji tuntas);
- tuntaskan studi pemeriksaan awal;
- siapkan metode dan rancangan survey;
- bentuk tim penilai dan siapkan untuk bekerja;
- komunikasikan jadwal penilaian kepada anggota tim, Organisasi, pakar dan pemangku kepentingan terkait;
- pertimbangkan semua persiapan logistik yang diperlukan (dan implikasi anggaran);
- siapkan peta tutupan lahan termasuk klasifikasi vegetasi SKT awal, analisis petak awal, dan peta dasar lain dan distribusikan ke pemangku kepentingan terkait;
- identifikasi pemangku kepentingan dan hubungi sesuai kebutuhan serta berikan informasi terkait penilaian mendatang, tanggung jawab tim penilai, dan pilihan waktu



2.5 PENILAIAN LENGKAP

Keluaran utama penilaian lengkap adalah laporan kerja lapangan serta peta lingkungan dan sosial yang memungkinkan tim penilai meneruskan analisis serta mengambil kesimpulan mengenai keberadaan dan lokasi tanah masyarakat, NKT, hutan SKT, gambut, dan wilayah yang cocok untuk pengembangan. **Pada saat kerja lapangan, jika tim penilai menemukan bukti bahwa masyarakat belum mendapatkan informasi memadai mengenai proyek, penilai harus menyampaikannya kepada Organisasi dan masyarakat serta merekomendasikan tambahan kegiatan pelibatan masyarakat.**

Tim penilai, mungkin didampingi para pakar lain, mengunjungi lokasi lapangan (AOI) untuk mengumpulkan data primer. Kajian akan tergantung pada data yang dimiliki dan kondisi spesifik di lokasi. Pengumpulan data primer biasanya terbagi menjadi dua: kerja lapangan sosial dan kerja lapangan lingkungan.

Berikut ini sejumlah saran yang perlu dipertimbangkan:

- kengkoordinasikan susunan dan pilihan waktu studi lapangan yang dapat memaksimalkan waktu dan sumber daya, sambil mengumpulkan informasi secara seksama dan bertanggung jawab secara sosial;
- libatkan perwakilan masyarakat mendampingi tim pengumpul data biologis dan biomassa di lapangan;
- idealnya, selesaikan kajian sosial dan pemetaan sebelum pengumpulan data keanekaragaman hayati dimulai karena beragam alasan penting dan logis (contohnya, agar pengambilan sampel botani tidak dilakukan di lokasi yang dianggap keramat). Namun, selama sudah ada persetujuan untuk menetapkan lahan inventarisasi hutan, tim lapangan hutan dapat melaksanakan kajian dan pada saat yang sama melakukan kajian sosial dan pemetaan;
- kerja lapangan NKT-SKT seringkali dilakukan bersamaan dan digabungkan dengan ESIA, sesuai peraturan nasional dan standar-standar sertifikasi.

2.5.1 Kerja lapangan sosial

Rancang kerja lapangan agar hasilnya benar-benar bermanfaat, misalnya.:

- pahami sistem mata pencaharian dan penguasaan lahan sehingga lahan untuk mata pencaharian masyarakat dapat diidentifikasi dan dipisahkan dari usaha pengembangan dan konservasi yang ketat;
- identifikasi lokasi dan sumber daya penting untuk penggunaan SDA – NKT 4 dan 5 (contohnya, air, perikanan, perburuan, meramu hasil hutan bukan kayu/HHBK);
- identifikasi lokasi budaya dan sumber daya penting (contoh, tempat upacara adat, spesies totem – NKT 6);
- identifikasi bagaimana proyek yang diajukan akan memengaruhi penggunaan dan akses sumber daya yang dimiliki masyarakat

Kajian sosial harus dilakukan secara partisipatif dan inklusif dengan masyarakat yang terkena dampak dan pelaku kepentingan lokal lainnya dengan keterlibatan yang bertanggung jawab dan sensitif untuk menghindari ekspektasi berlebihan. Kajian sosial akan menyediakan informasi tergantung konteksnya, seperti kajian sosial dasar, penilaian dampak sosial, dan/atau penilaian penguasaan lahan yang dilaksanakan di AOL. Jika demikian, kajian-kajian ini menjadi kontribusi berharga untuk penilaian NKT-SKT dan dapat digunakan sebagai data sekunder mengidentifikasi tanah masyarakat lokal dan NKT. Namun, tim penilai akan menggunakan triangulasi untuk memvalidasi keluaran utama kajian-kajian ini dan memeriksa kualitas pemetaan partisipatif.



2.5.1.1 Pemetaan partisipatif

Catatan: Lihat Kotak 3 untuk penjelasan pemetaan partisipatif dalam konteks penilaian NKT-SKT.

Pada saat penilaian NKT-SKT, pemetaan partisipatif merupakan alat mengidentifikasi NKT 4, 5, 6, serta penggunaan lahan komunitas lainnya – dan alat diskusi mengenai kebutuhan lahan dan sumber daya mendatang (yaitu, identifikasi wilayah untuk kebutuhan mata pencaharian di masa depan). **Pemetaan partisipatif harus berbasis SIG sehingga peta-peta tersebut dapat diselaraskan dengan hasil penilaian lain.** Masyarakat mengidentifikasi wilayah yang memiliki hak ulayat dan wilayah mana yang penting bagi mereka atas dasar alasan historis, mata pencaharian mereka sekarang dan masa depan, nilai budaya, atau penyediaan jasa ekosistem. Masyarakat dapat menggunakan hasil pemetaan sebagai dasar menegosiasikan perencanaan penggunaan lahan dengan perusahaan. Idealnya masyarakat memiliki kapasitas memimpin pemetaan partisipatif.

Pemetaan partisipatif direkomendasikan untuk semua tanah masyarakat dan bukan hanya wilayah yang tumpang tindih langsung dengan wilayah pengembangan potensial (konsesi, wilayah perizinan, dll.)¹⁹. Pemetaan ini akan memberi gambaran lebih komprehensif mengenai kepemilikan dan penggunaan sumber daya masyarakat, dan oleh karena itu, pemahaman lebih baik mengenai dampak nyata dari pengembangan terhadap seluruh masyarakat (yaitu, sebesar apa ketergantungan masyarakat pada wilayah pengembangan yang diajukan).

Semua masyarakat²⁰ yang terkena dampak harus dilibatkan di dalam kegiatan pemetaan partisipatif. Ketika masyarakat tidak menyetujui pemetaan partisipatif, lahan/wilayah mereka tidak dapat dianggap telah dievaluasi dan tidak dapat ditandai untuk pengembangan proyek. Informasi berikut ini bermanfaat untuk dikumpulkan:

- lokasi desa yang terkena dampak dan wilayah penggunaan sumber daya mereka (dengan hak resmi atau adat) – periksa kajian penguasaan lahan;
- lokasi dan batas tanah resmi dan tanah adat, identifikasi tanah resmi dan tanah adat, identifikasi wilayah yang terikat pada hak tanah resmi, adat, dan tidak resmi, serta hak guna – periksa kajian penguasaan lahan;

¹⁹ Dengan asumsi PADJATAPA sudah diberikan untuk pemetaan.

²⁰ Semua masyarakat di lanskap produksi kemungkinan besar akan terkena dampak tetapi fokus diberikan pada masyarakat dengan hak di dalam konsesi.

- lokasi yang sangat penting bagi masyarakat lokal untuk jasa ekosistem (NKT 4);
- lokasi penting untuk mata pencaharian dan ketahanan pangan (NKT 5), termasuk:
 - wilayah pertanian (aktif) dan ladang terkini;
 - sumber air yang dipakai untuk kepentingan rumah tangga dan perikanan;
 - wilayah perburuan;
 - lokasi pengumpulan HHBK penting
- lokasi bersejarah, budaya, atau keramat (contoh, kuburan, bekas desa, lokasi upacara adat, hutan kecil yang dianggap keramat, air terjun) (NKT 6)

Sesudah peta dibuat, hasilnya dipresentasikan kembali ke masyarakat untuk dikomentari dan dikoreksi. Peta final merupakan hasil kolaborasi antara tim penilai dan perwakilan masyarakat. Pemetaan dapat mengidentifikasi tanah masyarakat yang harus dikecualikan dari klasifikasi hutan SKT dan/atau pengembangan proyek.

Dokumen Acuan

- Modul 2 Set Alat SKT
- Panduan Umum Identifikasi NKT: Bagian 3.4-3.6
- Panduan Umum Pengelolaan dan Pengawasan NKT: Bagian 3.3

2.5.1.2 Kajian sosial

Selain pemetaan partisipatif, tim penilai dapat melaksanakan kajian sosial untuk mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai penggunaan sumber daya lokal dan strategi mata pencaharian. Beragam pembelajaran partisipatif dan metodologi aksi – termasuk kelompok fokus, kalender musim, dan praktik penentuan peringkat – dapat digunakan untuk memastikan informasi terkumpul lewat keterlibatan penuh masyarakat. Tim penilai harus menggunakan semua kajian sosial yang tersedia (terbaru dan berkualitas baik) seperti kajian sosial dasar, Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assessment/SIA) dan penilaian penguasaan lahan (termasuk peta penguasaan lahan). Beberapa informasi dari kajian ini dapat divalidasi pada saat penilaian dan jika terdapat kesenjangan dalam informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi NKT, tim penilai melanjutkan dengan mengumpulkan data primer.

2.5.2 Kerja lingkungan di lapangan

Kajian lingkungan yang dilaksanakan pada saat penilaian akan ditentukan oleh informasi yang didapatkan pada saat studi pemeriksaan awal.

Rancang studi lapangan sehingga hasilnya bisa bermanfaat, misalnya.:

- identifikasi spesies dan ekosistem langka, terancam, atau hampir punah (NKT 1 dan 3);
- evaluasi apakah ada Lanskap Hutan Utuh atau lanskap besar lain (NKT 2);
- identifikasi jenis ekosistem;
- identifikasi hutan SKT

Dokumen Acuan

- Modul 4 Set Alat SKT

2.5.2.1 Inventori hutan SKT

Penilaian akurasi klasifikasi tutupan lahan final dapat dilaksanakan lewat survei lapangan. Ketika memilih jumlah sampel untuk dikumpulkan di lapangan, harus ada keseimbangan antara pemenuhan standar statistik dan pencapaian praktis. Modul 4 menyarankan untuk mengumpulkan minimum 50 sampel untuk setiap kelas tutupan lahan. Untuk wilayah lebih luas (lebih dari 400.000 ha), disarankan minimum 75 sampel harus dikumpulkan per kelas tutupan lahan. Sebagai tambahan, pilihan dan distribusi sampel (skema pengambilan sampel) merupakan komponen penting untuk penilaian akurasi. Lima tipe skema pengambilan sampel dijelaskan dalam Modul 4 Set Alat SKT.

Rincian pohon mana yang akan diukur dijelaskan di Modul 4 Set Alat Bagian C. Semua pohon di lahan yang diukur harus diidentifikasi sampai ke genusnya dan lebih baik lagi jika spesiesnya diidentifikasi. Jika genus tidak dapat diidentifikasi, sampel foto dan botani harus dikumpulkan dan ditandai sehingga di kemudian hari dapat diidentifikasi para ahli. Untuk identifikasi NKT, lahan hutan SKT dapat dirancang untuk menangkap data NKT penting, seperti: keanekaragaman, indikator kualitas habitat, dan informasi spesies. **Daftar spesies harus disusun menjadi daftar spesies yang terlindungi nasional dan/atau internasional dan kategori IUCN (yaitu, Terancam Genting, Rentan) dan spesies endemik, serta spesies yang terutama berguna untuk mata pencaharian lokal, seperti yang diidentifikasi pada saat pemetaan partisipatif dengan masyarakat lokal.**

2.5.2.2 Usaha identifikasi NKT

Selain data NKT yang dapat dikumpulkan pada saat pengambilan sampel lahan SKT, fokuskan usaha identifikasi NKT pada:

- wilayah yang berpotensi tinggi memiliki NKT (berdasarkan studi literatur dan konsultasi). Jika melihat dari perspektif praktis, meski penting mendapatkan set data dasar dari kawasan NKT untuk pengelolaan wilayah di masa depan, fokus pada pengambilan sampel NKT di wilayah nonhutan SKT (wilayah yang tidak dilindungi di bawah SKT) merupakan pilihan logis. Namun, karena analisis petak final dilakukan di akhir penilaian – perubahan kelas hutan apa pun di dalam peta dan implikasi apa pun atas nilai di petak-petak tersebut harus dipertimbangkan. Ini merupakan hal yang Jaringan Sumber Daya NKT ingin mengumpulkan pembelajaran setelah lebih banyak penilaian terpadu dilaksanakan;
- pemangku kepentingan mengemukakan sejumlah kekhawatiran tertentu (contoh, spesies, habitat, nilai sosial).

Vegetasi di ekosistem bukan hutan

Ekosistem bukan hutan apa pun di dalam AOI harus diidentifikasi dan dijelaskan. Tim penilai diharapkan telah melakukan penelitian karakteristik dan nilai potensial yang terdapat di wilayah ini pada saat studi pemeriksaan awal (dibantu oleh peta tutupan lahan). Konsultasi dengan pakar berperan penting untuk memahami apakah ekosistem tersebut merupakan bagian dari konservasi. **Jika studi literatur atau konsultasi pakar menunjukkan adanya nilai potensial, maka kerja lapangan harus dilaksanakan untuk memahami nilai potensial tersebut.** Hal berikut ini dapat memicu pelaksanaan kerja lapangan yang lebih terperinci:

- tinjauan pustaka dari basis data spesies langka, terancam, atau



hampir punah menjelaskan kemungkinan keberadaan spesies herbal yang dianggap penting;

- konsultasi dengan pakar (contoh, pakar botani tropis) menunjukkan kekhawatiran akan keberadaan spesies yang dianggap penting;
- ekosistem tempat spesies langka atau spesies fauna penting;
- Dokumen Acuan
- Panduan Umum Identifikasi NKT: Bagian 3.1
- Panduan Umum Pengelolaan dan Pengawasan NKT: Bagian 3.3. dan Lampiran 2
- ekosistem yang memiliki spesies penting untuk mata pencaharian lokal

Dokumen Acuan

- Panduan Umum Identifikasi NKT: Bagian 3.1
- Panduan Umum Pengelolaan dan Pengawasan NKT: Bagian 3.3. dan Lampiran 2

Kajian fauna

Identifikasi spesies fauna langka, terancam kritis, dan terancam genting (NKT 1) atau habitat tempat tinggal spesies ini (NKT 1, 2, dan 3) dapat dilakukan melalui kombinasi penelitian berbasis kajian pustaka, konsultasi, dan studi lapangan. Keputusan studi lapangan apa yang harus dilaksanakan harus didiambil berdasarkan informasi yang tersedia. Contohnya, jika survei burung terbaru telah dilaksanakan, maka tidak ada alasan mengulangi proses ini, tetapi penilai bisa fokus pada kelompok taksonomi yang belum didokumentasikan dengan baik, misalnya, fauna air. Selain itu, harus ada lebih banyak informasi mengenai spesies konservasi penting (contohnya, disebutkan pada saat konsultasi dengan pakar biologi) dan spesies yang akan paling terkena dampak oleh proyek yang diajukan agar rekomendasi pengelolaan yang baik dapat dibuat.

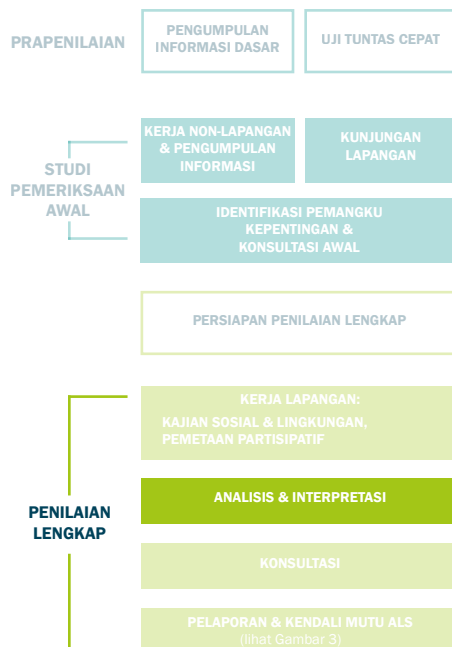
2.5.2.3 Kajian biofisika

It is important to describe the main biophysical characteristics of the Karakteristik biofisika wilayah penilaian penting untuk dijelaskan. Ini termasuk tanah, geologi, dan hidrologi. Organisasi biasanya memiliki data tanah dan mungkin juga memiliki set data lain yang lebih padat. Bagian ini dapat ditulis singkat di dalam laporan, tapi manfaat utama dari jenis data ini adalah para penilai dapat terbantu memahami pola banjir musiman, risiko erosi, dan keberadaan tipe ekosistem atau spesies yang dapat dikaitkan dengan jenis tanah atau siklus banjir tertentu.

2.5.2.4 Memverifikasi kajian gambut

Dalam pendekatan SKT, tanah gambut (dengan kedalaman apa pun) tidak boleh dikembangkan. Oleh karena itu, tanah gambut harus diidentifikasi agar dapat dilestarikan dan ini berarti kajian pemetaan gambut²¹ harus dilaksanakan oleh surveyor tanah berkualifikasi. Ini bukan peran penilai dan Organisasi kemungkinan akan menunjuk penilai khusus untuk melaksanakan kajian terpisah. Namun, tim penilai harus memiliki pakar yang mampu menerjemahkan hasil survei tanah dan dapat melakukan pemeriksaan beberapa titik dengan bor tanah

²¹ Pemetaan gambut adalah bidang khusus dan harus dikomisi secara terpisah karena pemetaan ini sangat intensif dan tidak bisa diselesaikan di dalam kerangka waktu kerangka kerja NKT-SKT. Kajian tanah idealnya harus dilaksanakan lebih cepat dan datanya disediakan untuk tim penilaian



2.6 ANALISIS DAN INTERPRETASI

Langkah analisis data dan interpretasi adalah ketika identifikasi NKT dan analisis petak hutan SKT dilaksanakan. Ini saat ketika semua data yang dikumpulkan diperiksa untuk membuat sintesis dan kesimpulan. Tujuan langkah ini adalah mengidentifikasi nilai (contohnya, NKT dan petak hutan SKT) di dalam AOI yang harus dilestarikan untuk tujuan keanekaragaman hayati dan mata pencaharian. Untuk meminimalkan konflik, tim penilai perlu berkomunikasi secara reguler dengan Organisasi dan pemangku kepentingan utama (contohnya, masyarakat yang terkena dampak) agar mereka memperoleh informasi memadai setiap saat. Para pemegang hak harus diundang memberi masukan atas rancangan peta dan rekomendasi sebelum diadakan konsultasi pemangku kepentingan lebih luas.

Tugas utama²² pada langkah ini meliputi:

- identifikasi NKT
- analisis petak hutan SKT;
- identifikasi tanah masyarakat lokal (termasuk “wilayah mata pencaharian mendatang”);identifikasi lahan gambut (jika relevan)
- penyelarasan beberapa set data terkait untuk mengembangkan rancangan peta konservasi
- rancangan rekomendasi pengelolaan
- persiapan konsultasi dengan pemangku kepentingan

2.6.1 Identifikasi NKT

Tim penilai, dengan konsultasi bersama pemangku kepentingan dan para pakar, meninjau data biologis, ekologis, dan sosial yang relevan (primer dan sekunder) untuk mengidentifikasi NKT. Penilai harus memberikan penjelasan dan justifikasi, didukung oleh bukti dari penilaian mengenai keberadaan setiap NKT (1-6), serta kemungkinan ada atau tidak adanya NKT. Untuk petunjuk identifikasi NKT terperinci, silakan baca **Panduan Umum Identifikasi NKT**. Penilai juga harus mempersiapkan peta NKT dan kawasan pengelolaan NKT.

Dokumen Acuan

- Panduan Umum Identifikasi NKT

KOTAK 4: PENGGUNAAN INTERPRETASI NASIONAL NKT

Interpretasi Nasional NKT dapat mengandung informasi bermanfaat terkait indikator dan sumber informasi untuk menilai nilai sosial dan lingkungan penting. Namun, ketika interpretasi nasional bertentangan dengan Panduan Umum Jaringan Sumber Daya NKT untuk Identifikasi NKT, yang dipakai adalah Panduan Umum. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait hal ini, hubungi Jaringan Sumber Daya NKT. Penggunaan Interpretasi Nasional NKT harus dinyatakan dan dijustifikasi dengan jelas.

²² Tugas-tugas ini tidak ditulis secara berurutan dan tidak saling terikat. Kemungkinan akan ada tumpang tindih dan analisis satu wilayah (contohnya, petak hutan SKT) dapat membantu identifikasi wilayah yang bermanfaat (contohnya, HCV 1).

Dokumen Acuan

- Modul 5 Set Alat SKT

2.6.2 Analisis petak hutan SKT

Di langkah awal penilaian, tim menggunakan pengindraan jarak jauh dan data survei lapangan untuk mengembangkan peta wilayah hutan SKT potensial di AOI. Pada tahapan analisis dan interpretasi, pakar SKT menggunakan Pohon Keputusan Analisis Petak Hutan SKT untuk menentukan kepentingan dan prioritas setiap petak hutan dan apakah petak hutan tersebut harus dicantumkan di dalam rencana konservasi berdasarkan ukuran, bentuk, dan konektivitas ke petak lain, wilayah riparian, wilayah gambut, atau kawasan NKT.

2.6.3 Identifikasi tanah masyarakat masyarakat lokal

Hasil pemetaan partisipatif dan kajian sosial akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan kualitas, cakupan, dan lokasi lahan yang harus dialokasikan untuk kebutuhan mata pencaharian di masa depan. Sekalipun jumlah lahan sebenarnya yang dibutuhkan untuk ketahanan pangan harus ditentukan kasus per kasus melalui proses perencanaan penggunaan lahan kolaboratif, termasuk pemetaan partisipatif, Set Alat SKT menetapkan minimum 0,5 ha lahan pertanian per orang di unit keluarga harus dialokasikan untuk tujuan ini. Perlu ditekankan bahwa angka 0,5 ha/orang adalah angka indikatif dan jumlah lahan sebenarnya yang dibutuhkan untuk kebutuhan mata pencaharian mendatang kemungkinan besar akan melebihi jumlah tersebut. Untuk tujuan penilaian NKT-SKT, penilai diharapkan terlibat dalam diskusi mengenai lahan yang dibutuhkan untuk mata pencaharian mendatang dan memetakannya jika mungkin. Namun, angka dan peta yang disajikan dalam laporan penilaian hanya dianggap indikatif. Angka dan peta harus diperbaiki dan disepakati melalui PADIATAPA pada saat pengembangan ICLUP yang diajukan.

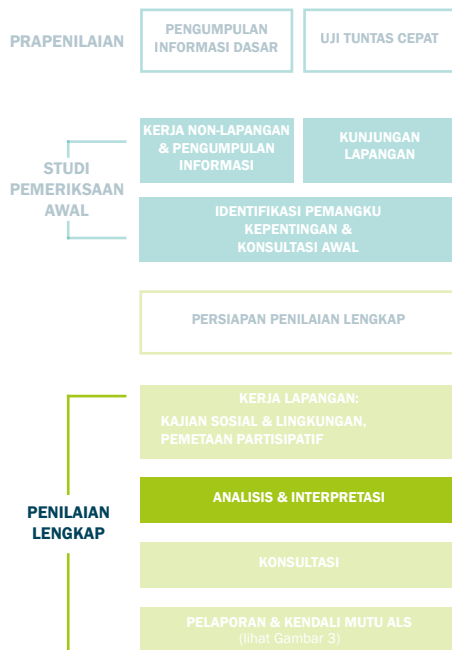


2.6.4 Menginterpretasi kajian gambut

Hal berikut ini dapat membantu tim penilai mengevaluasi kajian gambut:

- Mengidentifikasi gambut hanya di dalam konsesi tidak akan memadai karena tidak semuanya memiliki komitmen gambut sama. Di luar manajemen praktik terbaik, kondisinya adalah antara (a) “perlindungan hutan rawa gambut” atau (b) “tidak ada pengembangan baru di lahan gambut”. Kondisi ini harus dibedakan dari awal karena memerlukan pendekatan berbeda yang akan (a) mendefinisikan dan mendelineasi hutan rawa gambut atau (b) mendefinisikan dan mendelineasi lahan gambut yang tidak dikembangkan, terlepas dari status hutan. Untuk “hutan rawa gambut yang tersisa”, terdapat tumpang tindih antara SKT dan gambut, sementara “tidak ada perkembangan baru di lahan gambut” harus mendefinisikan lahan gambut yang tidak dikembangkan, yang merupakan tampilan perkebunan dan lahan gambut yang ada. Di kedua kasus, langkah yang tepat adalah mengidentifikasi sejauh apa drainase di dalam wilayah harus dilindungi (tidak dikembangkan) karena lahan-lahan ini harus direstorasi atau direhabilitasi.
- Wilayah penyangga kemungkinan harus membatasi dampak limpahan drainase ke hutan gambut terlindungi (diestimasi sekitar 500 m hingga 1 km+ tergantung situasi).
- Pengelolaan lahan gambut membutuhkan definisi wilayah

pengelolaan air yang koheren untuk menciptakan wilayah hutan gambut/gambut terlindungi yang terhubung secara hidrologis.



2.6.5 Menyelaraskan set data yang relevan untuk mengembangkan rancangan peta konservasi

Tim penelitian sekarang dapat menyelaraskan semua set data yang relevan untuk mendapatkan gambaran lokasi semua wilayah konservasi potensial dan di mana Organisasi dapat melanjutkan dengan kegiatan produksi komoditas. Kegiatan ini menyediakan hasil visual dari semua studi lapangan, studi literatur, dan pemetaan partisipatif yang dilaksanakan pada saat penilaian.

Set data relevan yang diselaraskan termasuk:

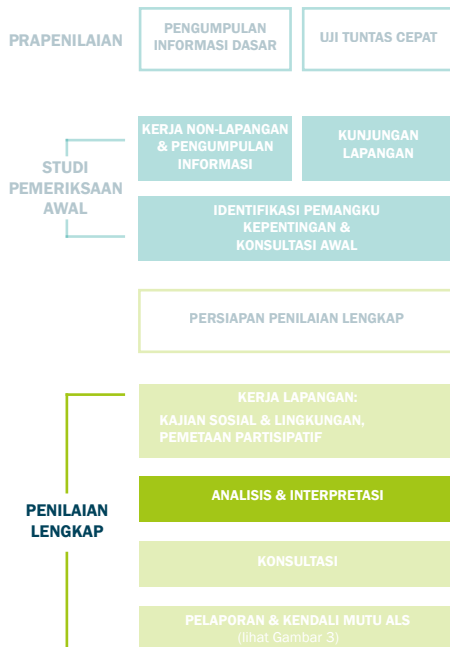
- lokasi NKT dan lokasi kawasan pengelolaan NKT;
- wilayah tanah gambut;
- penguasaan tanah masyarakat setempat (termasuk batas-batasnya) dan penggunaan lahan (termasuk penggunaan lahan/sumber daya sekarang dan mendatang) – setidaknya wilayah indikatif;
- wilayah hutan SKT;
- wilayah terlindungi secara resmi dan wilayah konservasi yang diperlukan (contohnya, wilayah terlindungi, lahan gambut terlindungi, kemiringan, wilayah riparian) – jika belum dicantumkan di dalam peta yang disebutkan di atas.

Hasil penilaian NKT-SKT adalah laporan penilaian yang terdiri dari hal berikut ini::

- identifikasi nilai (NKT, hutan SKT, lahan gambut, tanah masyarakat masyarakat lokal) yang didukung bukti;
- peta wilayah konservasi yang diajukan, wilayah penggunaan lahan masyarakat, dan wilayah pengembangan yang diajukan;
- rekomendasi pengelolaan dan pengawasan.

Tim penilai diharapkan melaksanakan kegiatan Pohon Keputusan melalui langkah 13²³ ketika proses analisis petak hutan SKT dirampungkan. Kendali mutu ALS mengevaluasi laporan penilaian NKT-SKT yang mencantumkan wilayah konservasi yang diajukan, wilayah penggunaan tanah masyarakat, dan wilayah pengembangan yang diajukan, tetapi bukan ICLUP yang diajukan.

23 Langkah 13 dari Pohon Keputusan adalah “Finalisasi ICLUP yang diajukan”. Namun, untuk tujuan ALS, keluaran penilaian NKT- SKT yang kualitasnya diawasi ALS terdiri dari laporan penilaian dan bukan ICLUP yang diajukan. Ini akan lebih jelas saat Pendekatan SKT mengembangkan lebih banyak petunjuk mengenai pengembangan ICLUP yang diajukan..



2.6.6 Draf rekomendasi manajemen dan pengawasan

Sesudah menganalisis temuan studi pustaka dan kerja lapangan, serta mengidentifikasi nilai penting dan wilayah untuk konservasi (yaitu, NKT, hutan SKT, lahan gambut, tanah masyarakat setempat) – tim penilai harus menghasilkan serangkaian rekomendasi pengelolaan yang bertujuan mempertahankan nilai sosial dan lingkungan seiring berjalannya waktu. **Rekomendasi pengelolaan harus ditujukan secara spesifik kepada nilai yang diidentifikasi di lokasi penilaian dan dihubungkan dengan peta yang menunjukkan lokasi nilai dan wilayah pengelolaan.** Wilayah pengelolaan adalah wilayah yang harus dikelola (contohnya, terlindungi, dikelola secara aktif) untuk melestarikan nilai yang terdapat di wilayah tersebut. Wilayah pengelolaan seringkali lebih luas dibanding wilayah yang memiliki nilai. Contohnya, wilayah pengelolaan untuk spesies terancam kepunahan dapat mencakup wilayah tempat spesies tersebut bersarang dan mencari makanan. Walaupun rekomendasi pengelolaan harus dibuat sespesifik mungkin dengan nilai yang ada, penilai tidak diharapkan menjelaskan tujuan dan target pengelolaan secara terperinci karena hal-hal tersebut akan dijelaskan di dalam rencana pengelolaan lengkap.

Untuk memberikan rekomendasi pengelolaan yang kuat, penilai harus memahami: 1) kondisi yang harus ada untuk mempertahankan nilai sosial dan lingkungan seiring waktu; dan 2) risiko atau ancaman yang mengancam nilai-nilai tersebut. Rekomendasi pengawasan mengikuti tujuan pengelolaan secara keseluruhan. Jika tujuan pengelolaan adalah mempertahankan nilai sejalan dengan waktu, maka tujuan pengawasan adalah melacak dan mengukur apakah tujuan pengelolaan sudah terpenuhi. Para penilai harus menyediakan informasi potensi dampak operasi di NKT dan hutan SKT, mengidentifikasi kemungkinan pendekatan untuk menghindari, memitigasi, atau mengompensasi dampak negatif operasi, serta mendapatkan beragam perspektif dan rekomendasi terkait ancaman dan pilihan pengelolaan.

Dokumen Acuan

- Panduan Umum Pengelolaan dan Pengawasan NKT

Table 6 Example of how to present management and monitoring recommendations

NILAI LINGKUNGAN DAN SOSIAL YANG DILESTARIKAN	ANCAMAN PADA NILAI	REKOMENDASI PENGELOLAAN	REKOMENDASI PENGAWASAN
Alokasi lahan yang cukup untuk kebutuhan mata pencaharian masyarakat setempat	Imigrasi ke wilayah ini, mengarah ke tekanan pada lahan dan SDA	Memastikan dukungan mata pencaharian untuk masyarakat lokal dengan klaim tanah adat (seperti yang didokumentasikan dan disepakati di ICLUP). Jika pendatang dibutuhkan untuk tenaga kerja perkebunan, Organisasi harus membantu mengurangi tekanan pada lahan dan SDA	Melacak indikator mata pencaharian masyarakat lokal untuk menilai dampak proyek
Lahan gambut	Drainase, pembakaran, pelanggaran batas	Melindungi wilayah secara resmi jika mungkin.	Kunjungan berkala ke lahan gambut untuk mengukur kualitas dan cakupan.
NKT 1: Populasi orang utan yang penting	Hilangnya habitat dan degradasi	Melindungi habitat dan koridor yang digunakan oleh spesies.	• Survei populasi spesies tahunan (contohnya, individual) • Patroli pengawasan reguler untuk mempertahankan batas-batas kawasan NKT • Petunjuk cara mencegah dampak negatif yang tidak diharapkan sesudah mengungkapkan kehadiran dan lokasi spesies terancam bahaya kepunahan
NKT 6: Lokasi budaya atau spiritual yang penting untuk masyarakat lokal (contoh, air terjun dan hutan kecil)	Pelanggaran batas dan polusi	Dengan kolaborasi dan PADIATAPA masyarakat terkait, Organisasi akan mengambil tindakan mengamankan dan melindungi wilayah tersebut dari kerusakan atau gangguan, serta akan memastikan dan/atau membatasi akses ke wilayah tersebut, berdasarkan norma dan pilihan masyarakat. Untuk mempertahankan nilai yang teridentifikasi, zona penyangga dapat ditetapkan dan diamankan di sekitar wilayah tersebut.	Mengawasi kualitas air dan hutan.
Petak hutan SKT	Degradasi karena efek tepi atau pengambilan sumber daya yang ilegal atau tidak berkelanjutan	Kesepakatan mengenai batas-batas hutan dengan masyarakat dan demarkasi wilayah hutan untuk perlindungan	Mengawasi wilayah yang baru dibuka didukung oleh pengawasan satelit

Selain menyediakan rekomendasi pengelolaan dan pengawasan, dalam konteks lebih umum **penilai harus menyediakan daftar kegiatan atau proses yang harus dilakukan atau masih dilakukan, contohnya:**

- Beberapa kelompok masyarakat mungkin tidak menyetujui pemetaan partisipatif dan oleh karena itu wilayah/lahan mereka tidak dipetakan dan tidak dapat dipertimbangkan untuk kegiatan konservasi dan pengembangan. Namun, pada suatu titik kelompok masyarakat ini mungkin memutuskan terlibat kembali dengan Organisasi dan meminta kegiatan pemetaan dan penilaian dilanjutkan.
- Sejumlah langkah final Pohon Keputusan SKT, terutama “memberikan dan mengambil” wilayah yang mencakup tanah masyarakat. Kegiatan Pohon Keputusan yang belum selesai harus dijelaskan dalam laporan penilaian.
- Organisasi harus mengenali dan menghargai hak masyarakat ketika mereka menegosiasikan akses, penggunaan, atau pembatasan penggunaan lahan. Organisasi harus memberikan informasi lengkap kepada masyarakat terkait implikasi hukum dari menerima pengembangan dan wilayah konservasi yang diajukan, serta mengeksplorasi pilihan penguasaan lahan, pengelolaan, dan pengawasan. Organisasi juga harus mengklarifikasi batasan dan manfaat kompensasi yang akan diaplikasikan pada mata pencaharian masyarakat dan pilihan penggunaan lahan sebagai akibat dari wilayah yang dimasukkan ke kelas wilayah konservasi (contoh, hutan NKT dan SKT).
- Organisasi akan menerima peta yang disetujui (dibuat pada saat pemetaan partisipatif) sebagai dasar negosiasi penggunaan lahan yang diajukan untuk pengembangan komoditas, pemeliharaan mata pencaharian, dan wilayah konservasi. Peta-peta tersebut menjadi milik masyarakat dan hanya digunakan berdasarkan persetujuan masyarakat.
- Peran dan tanggung jawab beragam pelaku dalam pengelolaan dan pengawasan (jika memungkinkan).
- Peningkatan kapasitas tambahan dibutuhkan untuk beragam pelaku, dengan spesifik menyebutkan siapa (staf Organisasi, pimpinan masyarakat, dll.) serta pelatihan dan dukungan apa yang dibutuhkan untuk rekomendasi atau kegiatan pengelolaan dan pengawasan yang mana. Contohnya, Organisasi mungkin tidak memiliki keahlian internal mengembangkan atau melaksanakan rencana pengelolaan dan pengawasan, sehingga keahlian dan rencana peningkatan kapasitas mungkin dibutuhkan.



2.7 KONSULTASI

Hasil penilaian dan rancangan peta konservasi harus disebarakan ke masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan pendapat dan rekomendasi mereka melalui proses konsultasi. Walaupun konsultasi telah dilaksanakan dalam penilaian (contoh, konsultasi pada saat pemetaan partisipatif, konsultasi dengan pakar untuk membahas hasil studi lapangan), konsultasi pemangku kepentingan adalah kesempatan membahas hasil penilaian keseluruhan dan rekomendasi pengelolaan. Penilai bertanggung jawab mendokumentasikan dan membahas (jika relevan dan memungkinkan) kekhawatiran para pemangku kepentingan.

Tujuan konsultasi ini adalah mencapai konsesus atas nilai yang telah diidentifikasi dan lokasi wilayah pelestarian. Negosiasi paket insentif, manfaat, atau kompensasi untuk masyarakat tidak dibahas dalam penilaian. Untuk memastikan konsultasi bersifat produktif dan pemangku kepentingan setidaknya memperoleh informasi memadai, **tim penilai harus menyiapkan hal-hal berikut ini untuk sesi konsultasi:**

- rangkuman proyek pengembangan yang diajukan;
- langkah kunci proses penilaian;
- temuan utama:
 - deskripsi dan justifikasi NKT dan hutan SKT teridentifikasi dengan peta;
 - peta wilayah yang diidentifikasi sebagai tanah masyarakat (sekarang dan mendatang);
 - peta wilayah konservasi (contohnya, NKT, SKT, lahan gambut);
 - ancaman terhadap nilai sosial dan lingkungan yang teridentifikasi;
 - rekomendasi pengelolaan dan pengawasan.
- kekhawatiran atau masalah (dengan proses penilaian, temuan, operasi, dll.);
- wilayah konservasi yang tumpang tindih (untuk tujuan sosial dan/atau konservasi lingkungan) dan cara mengharmonisasikan pengelolaannya. Contohnya, implikasi pada penggunaan atau akses masyarakat jika terjadi penetapan kawasan NKT 4, 5, atau 6 atau konservasi NKT 1-3.

Konsultasi bisa diselenggarakan melalui beragam format, termasuk rapat desa, presentasi besar ke pemerintah dan LSM, rapat individual dengan para pakar atau pimpinan LSM, dll.

KOTAK 5: MENDOKUMENTASIKAN KONSULTASI

Laporan penilaian harus menjelaskan i) pendekatan (metode) yang dipakai dalam konsultasi pemangku kepentingan yang dilaksanakan pada saat penilaian, ii) materi (contohnya, peta) dan topik yang disajikan saat konsultasi, dan iii) rangkuman hasil konsultasi, termasuk bagaimana (jika memungkinkan) masukan digabungkan ke dalam laporan akhir. Lihat Lampiran 4 untuk persyaratan dokumentasi konsultasi. Sebelum mencantumkan nama, kekhawatiran, atau rekomendasi pemangku kepentingan dalam laporan final, kekhawatiran dan rekomendasi pemangku kepentingan harus dikonfirmasi agar dapat dipahami dan pemangku kepentingan telah memberi izin mendaftarkan nama mereka; ini dapat dilaksanakan misalnya dengan meminta masyarakat menyetujui catatan tertulis lewat surel²⁴. Namun, ketika anggota masyarakat ingin tetap anonim, keinginan mereka harus dihormati. Penilai dapat mencantumkan pendapat, kekhawatiran, dan rekomendasi pemangku kepentingan serta tetap menjaga anonimitas mereka. Selain itu, juga bermanfaat mencantumkan penjelasan singkat berisi respons tim penilai atau bagaimana kekhawatiran pemangku kepentingan dibahas dan/atau digabungkan ke hasil akhir dan rekomendasi.



2.7.1 Masyarakat yang Terkena Dampak

Mempresentasikan hasil penilaian kepada masyarakat yang terkena dampak dengan cara yang sepenuhnya transparan adalah persyaratan utama dalam penilaian. Konsultasi harus dipimpin oleh penilai tetapi direkomendasikan ini dilaksanakan dengan kehadiran atau berkolaborasi dengan tim sosial Organisasi, jika memungkinkan. Konsultasi ini harus memungkinkan masyarakat berkomentar dan membuat perubahan dalam temuan penilaian yang diajukan.

2.7.2 Organisasi

Organisasi terinformasikan cukup baik karena tim penilai bertemu atau berdiskusi rutin dengan staf kunci Organisasi, terkait proses penilaian dan temuan yang didapatkan. Manajemen Organisasi harus memahami hasil penilaian, terutama terkait cakupan kawasan pengelolaan NKT-SKT dan alasan melestarikannya.

2.7.3 Pemangku kepentingan lain

Penting untuk memastikan pemangku kepentingan lain seperti dinas pemerintahan dan LSM dilibatkan dalam konsultasi. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam langkah pengumpulan data (contoh, pemetaan partisipatif, kerja lapangan) kemungkinan akan tertarik dengan hasil penilaian. Sama halnya dengan anggota masyarakat atau organisasi yang menyuarakan kekhawatiran mengenai proyek pengembangan dan/atau proses penilaian di tahap awal penilaian. Di lokasi tempat NKT 1, 2, dan 3 ditemukan, LSM lingkungan dan pihak lain yang terkait keanekaragaman hayati dan konservasi habitat harus dilibatkan dalam konsultasi.

²⁴ Metode ini dianggap sebagai yang paling sesuai untuk, contohnya, pegawai pemerintah, staf LSM, dan pakar keilmuan dari organisasi penelitian universitas.

Kesimpulan dan/atau rekomendasi penilaian mungkin harus disunting berdasarkan umpan balik yang diberikan masyarakat, pemangku kepentingan lain, dan Organisasi. Proses konsultasi akhir dari penilaian ini mungkin tidak akan mencapai konsensus untuk semua poin – dan ini harus dijabarkan dengan gamblang dalam laporan penilaian. Sesudah laporan penilaian melalui proses kendali mutu ALS, konsultasi mungkin harus dilakukan lagi jika terdapat perubahan signifikan yang akan memengaruhi kesimpulan, rekomendasi, dan/atau peta. Silakan hubungi ALS untuk petunjuk lebih lanjut mengenai hal ini.



SESUDAH PENILAIAN, LANJUTKAN KE LANGKAH BERIKUTNYA

GERBANG PADIATAPA UNTUK MASYARAKAT:

Sesudah penilaian, masyarakat harus mendapat waktu meninjau informasi yang tersedia, berkonsultasi dengan anggota masyarakat lainnya dan dengan penasihat terpilih mereka, serta mencapai keputusan apakah mereka akan meneruskan atau tidak dan, jika ya, cara meneruskan pengembangan yang diajukan.

Mungkin beberapa kelompok masyarakat menyetujui proyek yang diajukan, tetapi kelompok lain mungkin justru menolak.





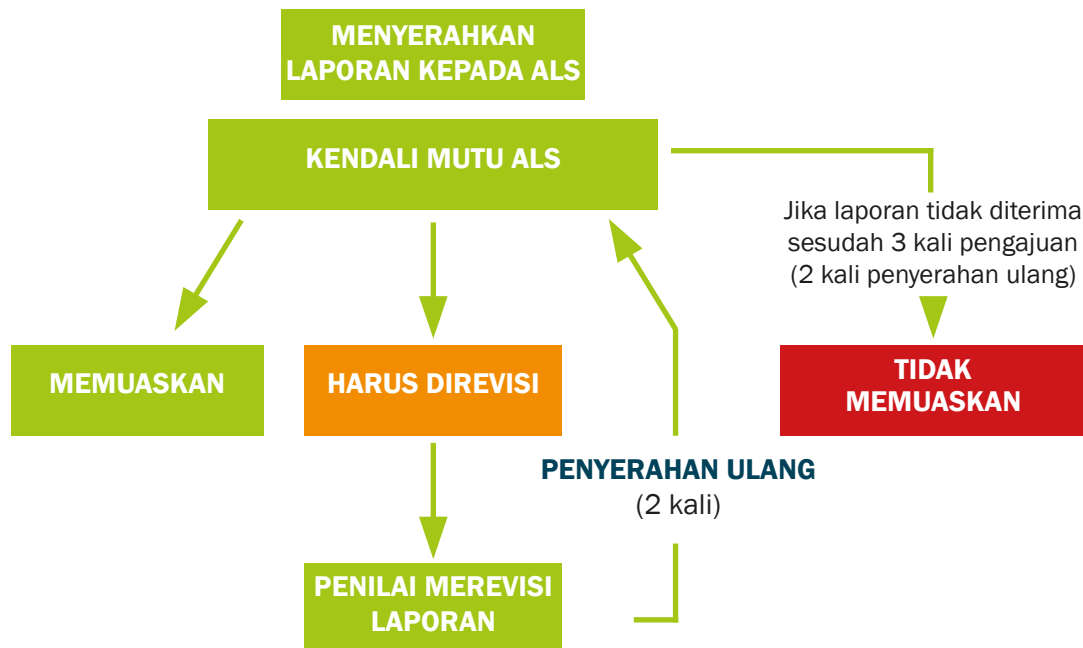
2.8 PELAPORAN DAN KENDALI MUTU

Langkah final proses penilaian NKT-SKT adalah persiapan laporan penilaian. Laporan penilaian harus ditulis berdasarkan Template Laporan Penilaian NKT-SKT dan diserahkan kepada Jaringan Sumber Daya NKT ALS untuk kendali mutu. ALS mengevaluasi isi laporan (contoh, identifikasi nilai yang didukung oleh bukti, peta, dan rekomendasi pengelolaan). **Ada Isu Kunci tertentu yang sangat dipertimbangkan pada saat evaluasi laporan dan dapat memengaruhi apakah laporan diterima atau ditolak oleh sistem (contoh, mendokumentasikan konsultasi dengan pemangku kepentingan). Isu Kunci terdapat pada templat Laporan Penilaian NKT-SKT.**

Patut dicatat tidak ada kewajiban untuk penelitian pustaka terpisah atas laporan ini karena proses kajian sejawat telah digabungkan ke dalam proses kendali mutu ALS. Laporan penilaian dengan materi pendukung²⁵ (contoh, peta, data) akan menjadi masukan penting dalam proses pengembangan ICLUP yang harus difasilitasi Organisasi sesudah laporan penilaian diserahkan kepada ALS.

Panel Mutu ALS memastikan semua dokumen yang dibutuhkan telah diserahkan dan semua biaya telah dibayar. Sesudah laporan dianggap lengkap, anggota Panel Mutu melaksanakan tinjauan laporan untuk menilai kualitas dan struktur isi laporan. Jika laporan ini memiliki kualitas dan struktur memuaskan, laporan dianggap dapat diterima sebagai masukan untuk pengembangan ICLUP. Jika laporan dianggap tidak memuaskan (yaitu, tidak memenuhi persyaratan ALS), penilai dapat mengajukan kembali laporan ini sebanyak dua kali (untuk total tiga kali upaya pengajuan laporan). Detail mengenai sistem pengendalian mutu laporan penilaian sedang dikembangkan. Lihat Gambar 3 untuk rangkuman skematis proses kendali mutu ALS.

Proses Kendali mutu



Gambar 3 Proses kendali mutu ALS untuk laporan penilaian NKT-SKT

²⁵ Daftar lengkap materi pendukung yang diajukan bersama laporan penilaian dicantumkan di templat penilaian NKT-SKT.

LAMPIRAN 1: KERANGKA ACUAN KERJA TIM PENILAI NKT-SKT

Tim penilai harus terdiri dari para pakar dengan keahlian dan pengalaman relevan untuk melaksanakan penilaian bermutu tinggi. Tidak ada kewajiban terkait jumlah anggota tim. Penekanannya lebih ke keahlian dan kualifikasi. Namun, diharapkan setidaknya ada tiga atau empat pakar kunci dalam tim (contoh, pimpinan tim, pakar SIG/ pengindraan jarak jauh, keahlian sosial, keahlian lingkungan). Berikut ini adalah kualifikasi anggota tim yang wajib dan direkomendasikan.

Harus dicatat bahwa pada periode awal sesudah publikasi Pedoman, beberapa persyaratan anggota tim penilai bersifat fleksibel dan ini dijelaskan lebih rinci di bawah ini.

PIMPINAN PENILAI

Wajib

- memiliki lisensi ALS (sementara atau penuh);
- merupakan praktisi SKT, terlatih dalam Pengelolaan Proyek SKT. Catatan: Pada periode awal sesudah publikasi Pedoman, sementara materi pelatihan dikembangkan, dua orang selain pimpinan penilai dapat menjadi anggota tim selain pimpinan penilai, yang terdaftar sebagai praktisi SKT;
- memiliki pemahaman yang baik akan pendekatan NKT dan SKT.

Direkomendasikan

- memiliki pendidikan dan/atau pelatihan terkait dalam setidaknya satu bidang yang diperlukan untuk penilaian NKT-SKT;
- memiliki pengalaman lokal di dalam negeri atau setidaknya di daerah;
- memiliki kemampuan membuat sintesis dari beragam data penelitian pustaka dan penilaian lapangan;
- kemampuan mencapai konsensus yang dapat diterapkan dari hasil penilaian serta rekomendasi pengelolaan dan pengawasan

PAKAR SIG/PENGINDRAAN JARAK JAUH

Wajib

- terdaftar sebagai praktisi SKT yang terlatih dengan Modul 5 SKT;
- memiliki keahlian menggunakan piranti lunak yang sesuai dengan kebutuhan data.

Direkomendasikan:

- memiliki pengalaman mengelola petak hutan SKT di negara di mana proyek berlokasi. Ini akan memungkinkan tenaga ahli untuk menstratifikasi kelas hutan dengan mengetahui kenyataan di lapangan.

ANGGOTA TIM LAIN

Anggota tim lain dapat memiliki lisensi ALS atau terdaftar sebagai praktisi SKT (setidaknya dua anggota tim harus terdaftar sebagai praktisi SKT). Pimpinan tim wajib dipilih dari praktisi SKT, tetapi di periode awal sesudah publikasi Pedoman, kriteria ini cukup fleksibel. **Silakan hubungi**

Jaringan Sumber Daya NKT ALS jika membutuhkan klarifikasi.

Tim survei hutan

Ada petunjuk spesifik mengenai komposisi anggota tim untuk tim survei hutan di Modul 4 (Bagian C) Set Alat SKT. Silakan merujuk pada petunjuk ini ketika menentukan siapa yang akan memimpin tim survei hutan dan siapa yang akan dibutuhkan sebagai anggota tim survei.

Pakar sosial

Setidaknya satu anggota tim harus memiliki keahlian sosial. Berikut ini adalah sejumlah panduan umum:

- memiliki pengetahuan dan pengalaman lapangan praktis dalam konteks lokal;
- fasih berbahasa bahasa nasional dan idealnya satu atau lebih bahasa daerah yang relevan;
- pengetahuan dan pengalaman praktis dalam penggunaan dan aplikasi fasilitasi masyarakat/pemetaan partisipatif dan metode ilmu social;
- pengetahuan mendalam mengenai sistem penggunaan tanah adat;
- idealnya memahami SIG.

Pakar keanekaragaman hayati/ekologi

Tidak ada kewajiban terkait jumlah pakar atau keilmuan yang diperlukan. Ini tergantung pada lokasi penilaian apa dan studi lapangan apa yang dibutuhkan. Namun, berikut sejumlah panduan umum:

- memiliki keahlian praktis dalam biologi konservasi terapan;
- memahami pendekatan konservasi lanskap;
- memahami lahan gambut dan persyaratan pelestarian gambut;
- spesialisasi dalam ekologi kelompok spesies penting;
- pengetahuan dan pengalaman praktis dalam penggunaan dan penerapan metode survei ekologi terkait;
- idealnya memahami SIG.

LAMPIRAN 2:

DAFTAR PERIKSA PERENCANAAN PENILAIAN

TOPIK PERENCANAAN	CATATAN
Tim penelitian: ToR, kualifikasi, ketersediaan, kontrak	
Komunikasi dengan Organisasi: Apakah Organisasi membantu mengatur logistik atau membayar pengeluaran tertentu? Klarifikasi hal ini sejak awal	
Perjalanan domestik: penerbangan, kendaraan, keamanan jalan, perjalanan dengan kapal, dll. Juga pertimbangkan kesulitan mengakses karena keamanan, medan, cuaca, dll.	
Transportasi di lapangan: Memastikan transportasi memadai untuk melaksanakan rencana pengambilan sampel (yaitu melakukan transek, menetapkan lahan, dll.) dan kajian sosial. Ini harus dikomunikasikan kepada manajer logistik sejak awal terutama untuk proyek berukuran sangat besar.	
Akomodasi: Tetap tinggal di lokasi atau di kota terdekat, apakah tim lapangan membangun pangkalan? Akses ke makanan dan air.	
Kesehatan dan keamanan: Vaksinasi, asuransi kesehatan, peralatan keselamatan jika perlu (misal, jaket pelampung di perahu)	
Persiapan lembar data, kuesioner, dll.	
Perlengkapan: kompas, unit GPS, meteran, dll.	
Dokumen acuan: Salinan petunjuk Jaringan Sumber Daya NKT dan Interpretasi Nasional NKT jika tersedia, modul Set Alat SKT, Persyaratan Sosial SKT. Petunjuk Implementasi (2018), Pedoman Penilaian, dll.	
Persediaan: Jatah makanan di lapangan, bahan bakar.	
Dokumen/data: Akses ke data apa pun dan dokumen yang diidentifikasi penting untuk penilaian.	

LAMPIRAN 3:

DAFTAR PERIKSA KEBUTUHAN INFORMASI

UJI TUNTAS BERBASIS STUDI PUSTAKA DAN PENGUMPULAN INFORMASI		
KARAKTERISTIK PROYEK	CATATAN HAL-HAL YANG DIKETAHUI	KESENJANGAN INFORMASI (DILENGKAPI PADA SAAT STUDI PEMERIKSAAN AWAL DAN/ATAU PENILAIAN LENGKAP)
Lokasi		
Ukuran wilayah operasi (ha)		
Deskripsi proyek (contoh, operasi kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dll.)		
Tutupan lahan/penggunaan lahan terkini		
Apakah penggunaan lahan yang direncanakan merupakan kelanjutan dari penggunaan terkini (contohnya, kehutanan di dalam lanskap berhutan, produksi pertanian di lanskap yang sebagian besarnya adalah pertanian) atau apakah penggunaan lahan yang direncanakan melibatkan konversi vegetasi alami?		
Seperti apa intensitas penggunaan lahan/sumber daya (contoh, hutan kemasyarakatan, pembalakan oleh masyarakat, pembalakan industri secara selektif, rotasi tebang habis, perkebunan pertanian, dll.)?		
Masyarakat mana yang kemungkinan terkena dampak?		
Apakah Organisasi sudah memulai proses PADIATAPA? Apakah ada deskripsi/kerangka waktu kegiatan PADIATAPA yang dilaksanakan dan direncanakan?		
Apakah Organisasi telah menjelaskan proyek ke masyarakat yang terkena dampak?		
Apakah sudah disetujui bagaimana/siapa yang mewakili pemangku kepentingan dalam proses PADIATAPA?		

**INFORMASI BERIKUT INI DAPAT DIKUMPULKAN PADA SAAT STUDI
PEMERIKSAAN AWAL DAN TAHAP PENILAIAN LENGKAP**

SUMBER DATA	CATATAN HAL-HAL YANG DIKETAHUI	KESENJANGAN INFORMASI (DILENGKAPI PADA SAAT STUDI PEMERIKSAAN AWAL DAN/ATAU PENILAIAN LENGKAP)
Interpretasi Nasional NKT (jika tersedia)?		
SEIA (jika tersedia)		
Situs dan publikasi yang relevan		
Peta yang ada		
Kajian atau laporan yang relevan (seringkali tidak diterbitkan)		

**INFORMASI BERIKUT INI DAPAT DIKUMPULKAN PADA SAAT STUDI
PEMERIKSAAN AWAL DAN FASE PENILAIAN LENGKAP**

LANSKAP	CATATAN HAL-HAL YANG DIKETAHUI	KESENJANGAN INFORMASI (DILENGKAPI PADA SAAT STUDI PEMERIKSAAN AWAL DAN/ATAU PENILAIAN LENGKAP)
Apakah lanskap sekitar mencakup wilayah terlindungi, wilayah keanekaragaman hayati, atau ekosistem yang dikelola dengan baik?		
Apakah lanskap sekitar mencakup pertanian ekstensif, industri berat, sumber polusi, pemukiman padat, dll.?		
Apakah ada fitur lanskap alami berukuran besar (hutan, dataran rumput, sungai, DAS, dll.)?		

**INFORMASI BERIKUT INI DAPAT DIKUMPULKAN PADA SAAT
STUDI PEMERIKSAAN AWAL DAN FASE PENILAIAN LENGKAP**

KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN KONTEKS EKOSISTEM	CATATAN HAL-HAL YANG DIKETAHUI	KESENJANGAN INFORMASI (DILENGKAPI PADA SAAT STUDI PEMERIKSAAN AWAL DAN/ATAU PENILAIAN LENGKAP)
Jenis dan kualitas ekosistem (termasuk air tawar)		
Apakah wilayah tersebut mendukung ekosistem/habitat yang langka atau tidak dilindungi dengan baik di negara di mana proyek berlokasi?		
Flora and fauna (termasuk kehadiran spesies langka, terancam kritis, dan terancam genting yang dilindungi pemerintah nasional)		
Produksi peta – peta apa yang dibutuhkan? Informasi apa yang dibutuhkan?		

**INFORMASI BERIKUT INI DAPAT DIKUMPULKAN PADA SAAT STUDI
PEMERIKSAAN AWAL DAN FASE PENILAIAN LENGKAP**

KONTEKS SOSIAL	CATATAN HAL-HAL YANG DIKETAHUI	KESENJANGAN INFORMASI (DILENGKAPI PADA SAAT STUDI PEMERIKSAAN AWAL DAN/ATAU PENILAIAN LENGKAP
Lokasi dan ukuran pemukiman (contoh, pemukiman terisolasi, hunian musiman, desa, kota kecil, kota besar, dll.)		
Informasi populasi umum: ukuran, suku, tren migrasi, organisasi, dan representasi		
Kegiatan mata pencaharian: ketergantungan pada SDA (contoh, pertanian, perikanan, meramu, berburu, air)		
Sistem penguasaan lahan (resmi dan legalitas hak ulayat, bagaimana hak atas tanah dapat ditransfer). Klaim tanah dan sumber daya tumpang tindih dengan wilayah penilaian.		
Infrastruktur (jalan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pasar, bendungan)		
Sejarah pemukiman, penggunaan lahan dan sumber daya, dan organisasi sosial/politik.		
Lokasi budaya, nilai budaya dan kepercayaan yang berhubungan dengan SDA dan tumpang tindih dengan wilayah penilaian		
Pembuatan peta: pemetaan partisipatif dibutuhkan di semua kasus di mana masyarakat tinggal atau memiliki klaim sumber daya yang tumpang tindih dengan AOI.		

LAMPIRAN 4:

MENDOKUMENTASIKAN KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Konsultasi pemangku kepentingan diharapkan terjadi pada saat penilaian. Konsultasi kemungkinan besar akan dimulai pada fase pengumpulan informasi dan bahkan pada tahap uji tuntas. Konsultasi dilanjutkan pada studi pemeriksaan awal ketika penilai akan melaksanakan kunjungan pertama ke masyarakat yang akan terkena dampak dari proyek yang direncanakan. Pada saat studi lapangan (terutama kajian sosial), konsultasi dilanjutkan. Terakhir, diadakan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak untuk membahas hasil penilaian NKT-SKT. Sebagai tambahan, konsultasi publik resmi mengenai hasil final sebagai bagian dari persyaratan skema sertifikasi bisa dilakukan.

Rincian berikut harus dicatat untuk semua konsultasi, meliputi:

- **Tanggal**
- **Rincian pemangku kepentingan**
 - jabatan atau peran;
 - organisasi atau kelompok sosial (contoh, petani, tetua masyarakat, perusahaan, pemerintah, administrasi desa, pakar, dll.);
 - metode konsultasi – yaitu jenis interaksi: rapat kelompok, pertemuan individu, telepon, dll;
 - deskripsi informasi yang dibagikan kepada individu/audiens dan cara presentasi (contohnya, tertulis, presentasi visual);
 - rangkuman kecemasan/rekomendasi utama
 - deskripsi singkat tanggapan tim penilai atau cara kekhawatiran pemangku kepentingan dibahas dan/atau dimasukkan ke dalam hasil akhir (contohnya, rekomendasi pengelolaan).

Dari dokumentasi yang terperinci ini, tabel rangkuman hasil konsultasi pemangku kepentingan harus dicantumkan dalam laporan penilaian laporan (lihat Templat Laporan Penilaian NKT-SKT).